



9%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 25 JUL 2024, 3:28 PM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

● IDENTICAL 0.22% ● CHANGED TEXT 8.77% ● QUOTES 8.12%

Report #22161187

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Konflik mengenai hutan adat masih menjadi permasalahan di Papua hingga saat ini. Data yang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2017-2019 mencatat terdapat 16 kasus konflik mengenai agraria yang ada di Papua (Pers, 2019). Konflik ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti, dibukanya lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, kebijakan otonomi khusus dan tata kelola hutan yang kacau, serta perusahaan yang tidak memberikan hak yang mereka janjikan kepada masyarakat. Jumlah deforestasi hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara, dan masih banyak lainnya semakin bertambah. Berdasarkan data dari VOA Indonesia, terdapat 435.223 hektare hutan Papua telah dibabat oleh produsen minyak sawit, sepanjang tahun 2011-2019 (Litha, 2021). Suku Awyu adalah salah satu dari banyak suku di Papua, tepatnya mereka berada di Provinsi Papua Selatan (Sorowat, 2023). Mereka adalah salah satu suku yang berupaya untuk melindungi hutan adat yang mereka miliki dari korporasi yang ingin dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Suku Awyu berusaha melindungi hutan adat mereka karena daerah tersebut menjadi sumber kelangsungan hidup suku Awyu untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti, mencari kayu bakar, berburu, hingga menjadi tempat mereka untuk mencari obat-obatan alami. Kasus ini dimulai dengan berita tentang rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di tanah

ulyat suku Awyu tepatnya berada di Distrik Fofi, kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Barat, diketahui oleh masyarakat setempat pada tahun 2022, dimana akan menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar melalui proyek Tanah Merah, yang dilakukan oleh perusahaan berikut, PT Megakarya Jaya Raya (MJR), PT Kartika Cipta Pratama (KCP), PT Indo Asiana Lestari (IAL), PT Nabati Usaha Mandiri (NUM), PT Graha Kencana Mulia (GKM), PT Manunggal Sukses Mandiri (MSM), dan PT Trimegah Karya Utama (TKU), namun tidak adanya informasi yang jelas mengenai bagaimana proyek tersebut dan bagaimana perusahaan tersebut bisa mendapat izin dari Pemprov Papua. 48

Karena tidak kunjung mendapatkan keterangan Hendrikus Woro mendaftarkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke PTUN Jayapura pada 13 Maret 2023 (Kurniati, 2023). Keputusan Dari KLHK mengenai regulasi dan pengaturan izin pengalihan hutan, yang melarang perusahaan untuk menebang hutan demi kegiatan perkebunan kelapa sawit, dipertanyakan oleh PT MJR dan PT KCP mereka yang diajukan di PTUN pada tanggal 15 Maret. 48 Kemudian enam masyarakat adat suku Awyu, salah satunya adalah Gregorius Yame dan Barbar Murki, mengajukan diri sebagai tergugat intervensi PT Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT Megakarya Jaya Raya (MRJ) di PTUN Jakarta pada 9 Mei 2023 (Kurniati, 2023). Pada Kamis, 6 Juli 2023, Pengadilan PTUN Jayapura menggelar persidangan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (PT IAL), sebuah perusahaan kelapa sawit. Persidangan tersebut menampilkan lima puluh dokumen sebagai bukti. Setelah PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan PT KCP dan PT MJR terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 5 September 2023, 65.415 hektar hutan hujan berhasil terlindungi. Pada 1 November 2023, PTUN Jayapura menolak gugatan yang diajukan komunitas adat Awyu, dengan memutuskan 2 bahwa kasus tersebut bukanlah sengketa yang bisa diselesaikan oleh pengadilan, serta tidak akan memeriksa rincian rekomendasi kesesuaian lingkungan atau penilaian Amdal (Adimaja, 2023). Konflik lingkungan hidup merupakan realitas dalam pemberitaan lingkungan yang memiliki nilai berita yang kuat. Dalam jurnalisme lingkungan mayoritas membahas mengenai konflik

antara hal-hal yang penting bagi kelangsungan hidup keanekaragaman hayati atau kepentingan untuk meningkatkan pendapatan daerah atau nasional, dengan menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga konflik sebagai nilai berita utama yang selalu menarik perhatian khalayak, selain itu nilai berita konflik banyak berkaitan dengan berita lainnya seperti human interest, significance, proximity dan impact (Sudibyo, 2014). Kasus perampasan hutan adat Awyu dianggap sebagai kasus konflik lingkungan karena berhubungan dengan investasi perusahaan yang ingin merampas ruang hutan adat. Hal ini mengakibatkan komunitas adat Awyu berjuang untuk menjamin hak atas tanah adat mereka dan melindungi lingkungan hidup. Peristiwa ini menciptakan konflik antara komunitas adat dan perusahaan, yang sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2023, Masyarakat Adat Awyu berhasil mengalahkan gugatan perusahaan sawit yang ingin merampas wilayah adat mereka (Sudibyo, 2014). Media memiliki tanggung jawab untuk mempublikasi masalah kontroversi tersebut, namun, media juga memiliki tugas utama yaitu menjadi watchdog atau pengawas yang bertujuan untuk mengontrol para pemegang kekuasaan agar tetap akuntabel, dimana media tidak hanya bertugas sebagai saluran saja, namun media juga bertugas untuk melindungi kebebasan individu warga negara dari intervensi negara (Marijan, 2019). Konflik tanah adat sebagai realitas lingkungan tidak selalu menjadi prioritas pemberitaan media online nasional, hanya media nasional yang melihat peristiwa ini sebagai isu yang mendesak seperti media Kompas.com yang memberitakan kasus ini. Selain itu media daerah Jerat Papua yang memiliki kedekatan dengan peristiwa yang secara konsisten memberitakannya. Berdasarkan pengamatan awal penelitian mengenai media yang mengangkat konflik tanah adat ini diperoleh data berikut. Data kompilasi jumlah berita konflik suku adat Awyu sejak Maret 2023 hingga Juni 2024.

Tabel 1. 1 Kompilasi jumlah konflik suku adat Awyu Papua pada media Nasional dari Maret 2023 - Juni 2024

No	Media	Jumlah Berita
1	Kompas.com	10
2	Detik.com	2
3	CNN Indonesia	2

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 1. 2 Kompilasi jumlah berita konflik suku adat Awyu Papua pada

media Lokal dari Maret 2023-Juni 2024 No Media Jumlah Berita 1 Papua Today 2 Radar Papua 3 Jerat Papua 12 Sumber: Olahan Peneliti Setelah melakukan pengamatan awal dengan melakukan perbandingan tiga media baik media nasional dan daerah, maka ditemukan jika Kompas.com secara kuantitas memiliki jumlah publikasi berita Suku Adat Awyu Papua paling banyak di antara media nasional yang lain, dan media yang menjadi perbandingan adalah media detik.com dan CNN Indonesia. Sama halnya dengan Kompas.com, media Jerat Papua menurut penelitian awal adalah media daerah yang 3 secara kuantitas memiliki jumlah publikasi paling banyak mengenai Kontroversi Masyarakat Suku Adat Awyu Papua, dibandingkan dengan media Papua Today dan Radar Papua. Sebagai contoh Kompas.com yang memberitakan konflik tanah adat suku Awyu pada 2023 dengan judul berikut bahwasannya masyarakat Awyu mendatangi (Komnas HAM) untuk meminta masalah agraria diperhatikan dengan serius. Karena daerah mereka masih banyak pelanggaran HAM mengenai agraria. Gambar 1. 2 . Contoh berita Jerat Papua (Jeratpapua.org) Berita diatas yang dirilis pada 13 Maret 2023. Bahwasannya suku Awyu mengajukan gugatan kepada PTSP Provinsi Papua mengenai lingkungan hidup yang dikeluarkan kepada perusahaan perkebunan sawit PT IAL. Gugatan ini dilakukan karena pemerintah daerah menutup informasi kepada masyarakat. Dari contoh berita di atas, secara sekilas sudah dapat dilihat bagaimana pembingkai berita dan cara penyajian berita. Antara media nasional yang fokus membahas alasan penggugatan dan media daerah yang fokus membahas bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan masyarakat Awyu selama ini. Media dapat memberikan informasi yang menggambarkan situasi nyata. Namun, informasi yang diberikan oleh media kepada pembaca tidak selalu sesuai dengan situasi sebenarnya. Media sering mengubah, memperluas, dan menampilkan informasi sehingga berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Selama proses pembentukan suatu peristiwa, media massa memainkan peran penting dalam menciptakan keadaan sosiologis. Analisis framing Gambar 1.1. Contoh berita Kompas.com (Kompas.com) 4 biasanya digunakan untuk menentukan bagaimana

media mempresentasikan peristiwa dengan menekankan detail-detail tertentu sambil mengabaikan yang lain. Melalui praktiknya, hampir semua media akan menyampaikan masalah menonjolkan aspek berbeda sambil menyembunyikan dan membuang aspek lain dari masalah tersebut (Eriyanto 2015).

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti mengaplikasikan analisis framing dalam mengidentifikasi media mengkonstruksi peristiwa dan menggunakan media massa sebagai acuan untuk menganalisisnya, sehingga dapat dibuat pembentukan tentang peristiwa tersebut. Dalam pembentukan ini, peneliti menggunakan framing Robert N. Entman, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan yang digunakan jurnalis untuk mendefinisikan masalah, memperkirakan masalah, menyimpulkan nilai moral, dan menekankan penelitian dari sebuah peristiwa (Eriyanto 2015). Penelitian ini turut memanfaatkan hasil penelitian terdahulu sebagai landasan. Pertama, menggunakan penelitian yang ditulis oleh Della Alfina Pratita pada tahun 2018 yang berjudul “Komunikasi Konflik Masyarakat Adat (Studi Kasus Konflik Perebutan Tanah Ulyat Masyarakat Desa Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat

105 Penelitian ini menggunakan analisis studi kasus Miles, Huberman dan Saldana.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat AKUR mengkomunikasikan konflik saat menghadapi perebutan tanah ulyat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kesimpulan dalam media ini akar dari konflik yang terjadi adalah perdebatan interpretasi warisan terhadap Jaka Rumantaka dan masyarakat AKUR (Pratita, 2018). Penelitian kedua ditulis oleh Al Fauzi Rahmat pada tahun 2021 dengan judul Pembingkai Berita Tentang Hutan NTB. Tujuan riset ini adalah untuk melihat pembingkai jurnalis, serta media berita dalam menerapkan konsep Entman. Kesimpulan dalam penelitian ini media yang digunakan memperlihatkan adanya narasi-narasi yang saling berhubungan dalam berbagai artikel mengenai permasalahan hutan NTB (Rahmat A.-F. , 2021). Kemudian penelitian terdahulu terakhir ditulis oleh Muhammad Bahy Rakha pada tahun 2022 berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria Di Desa Wadas, Purworejo (Studi pada Media Online Vice ID dan Detik.com) Tujuan dari riset ini untuk mengetahui

pembingkajian yang dilakukan oleh Vice ID dan Detik.com dalam konflik agraria desa Wadas.

59 78 104 118 Penelitian ini mengaplikasikan analisis kualitatif deskriptif dengan mengaplikasikan metode Framing Entman. Kesimpulan dari penelitian ini media Detik.com lebih condong membela pemerintah, dan Vice ID membela warga (Rakha, 2022). Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian terdahulu sebagai tinjauan literatur yang memiliki kedekatan dengan penelitian ini. Pada penelitian di atas terdapat persamaan terhadap isu konflik lingkungan, dan sama sama menggunakan konsep utama yang melihat objektivitas pada media online . Namun, penelitian ini membahas kasus yang berbeda dalam konteks Papua yang sering mendapat ketidakadilan yang masih sering terjadi, dan penelitian ini ingin melihat kecenderungan keberpihakan media, karena pada penelitian sebelumnya media nasional seperti Detik.com berpihak ke pemerintah, sementara media baru seperti Vice ID memihak kepada orang banyak atau masyarakat, dalam kasus ini ingin melihat bagaimana media nasional dan media lokal bagaimana pengerjaannya , sementara dari dua penelitian terdahulu dengan menggunakan satu media, tetapi penelitian ini akan menggunakan dua media, yaitu nasional dan lokal, yang memiliki latar belakang kepemilikan yang berbeda, penelitian ini juga membahas mengenai kasus konflik hutan adat Papua, dimana masyarakat Papua memiliki kedekatan dengan 5 hutan adat mereka, yang dianggap sebagai Ibu (Opu, 2021), dan penelitian ini mengaplikasikan model framing Robert N. Entman yang memiliki empat alat ukur. Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini mengambil judul “Pembingkajian Pemberitaan Konflik Tanah Adat Awyu Papua Pada Media Berita Online (Analisis Framing Robert N. Entman pada Kompas.com dan Jerat Papua Periode Maret 2023 – Juni 2024) 1.2. Rumusan Masalah Bagaimana pembingkajian konflik tanah adat Awyu Papua dalam berita Kompas.com dan Jerat Papua Periode Maret 2023 – Juni 2024? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembingkajian konflik tanah adat Awyu Papua pada media berita Kompas.com dan Jerat Papua Periode Maret 2023 – Juni 2024 . 1.4. Manfaat Penelitian Diharapkan bahwa temuan dari studi ini akan



memberikan manfaat. Ada dua kategori manfaat yang diharapkan dari studi ini: 1.4.1. Manfaat Akademis 1. Penelitian ini diharapkan memperkaya studi komunikasi di bidang jurnalistik lingkungan menggunakan analisis framing. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif mengenai kecenderungan media nasional dan lokal dalam mengangkat isu lingkungan pada masyarakat marginal.

1.4.2. Manfaat Praktis 1. Penelitian ini menjadi wacana, khususnya pekerja media berita terhadap komparasi bingkai media nasional dan daerah dalam pemberitaan konflik lingkungan hidup. 2.

Dihadapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai keberpihakan media pada isu lingkungan di kalangan masyarakat adat.

130 135

6 BAB II TINJAUAN

PUSTAKA 2.1. Penelitian Terdahulu Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No Judul | Penulis | Tahun Afiliasi Universitas Metode Penelitian

Kesimpulan Saran Perbedaan dengan Penelitian ini 1 Komunikasi Konflik Masyarakat Adat (Studi Kasus Konflik Perebutan Tanah Ulyat Masyarakat Desa Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, Kec. Cigugur, Kab.

Kuningan, Jawa Barat) | Della Alfina Pranita | 2018 Universitas

Brawijaya Analisis Kualitatif Studi Kasus Menurut sumber ini, Jaka

Rumantaka dan kelompok AKUR memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak waris, yang menyebabkan konflik. Penelitian ini bisa digunakan

sebagai acuan dalam menangani konflik adat, serta menjadi panduan bagi pemerintah untuk menghadapi situasi serupa. Penelitian terdahulu

melihat kasus melalui orang-orang yang terlibat, sedangkan penelitian yang

dilakukan meneliti kasus melalui kaca mata media. Terkadang masih ada bias, karena ditulis berdasarkan pengetahuan wartawan. 2 Pembungkai

Berita Tentang Hutan NTB | Al Fauzi Rahmat | 2021 (cari yang

konflik, yang ada sarannya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Analisis Framing Robert N. Entman Kesimpulan dalam penelitian ini

media yang digunakan memperlihatkan adanya narasi-narasi yang saling berhubungan dalam berbagai artikel mengenai permasalahan hutan NTB.

Studi sebelumnya terbatas pada satu media saja, sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan dua perspektif yang berbeda, yaitu nasional dan

lokal. 3 Analisis Framing Pemberitaan Konflik Universitas Lampung

Analisis Framing Robert N. Entman Media dalam membingkai berita

Peneliti berikutnya dapat mengemb Dalam kasus yang diteliti ini juga

menghadapi 7 Agraria di Desa Wadas, Purworejo (Studi pada Media Online

Vice ID dan Detik.com | Muhammad Bahy Rakha | 2022 berbeda- beda

dalam Detik.com membingkai jika pemerintah sudah menjalankan tugas

sesuai prosedur, sedangkan Vicie.id menyototi kekerasan aparat, hingga

tanggapan warga desa angka penelitian dengan menggunakan sumber-

sumber dan referensi yang lebih tepat dan terpercaya. an pemerintah

yang bekerjasama dengan pemerintah dan warga , namun konteksnya berbeda,

karena masyarakat Papua memiliki nilai hubungan dengan hutan. Sumber:

Olahan Peneliti Pada penelitian awal yang dibuat oleh Della Alfina

Pratita pada tahun 2018 dengan judul Komunikasi Konflik Masyarakat Adat

(Studi Kasus Konflik Perebutan Tanah Ulayat Masyarakat Desa Adat Karuhun

Urang (AKUR) di Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat). 105 Penelitian

ini menggunakan analisis studi kasus Miles, Huberman dan Saldana. Perbedaan antara

penelitian sebelumnya dan fokus penelitian oleh peneliti terletak pada

topik yang diselidiki dan jenis media yang dipergunakan (Pratita, 2018).

Penelitian terdahulu kedua ditulis oleh Al Fauzi Rahmat pada tahun 2021

dengan judul Pembingkai Berita Tentang Hutan NTB. Penelitian ini

menerapkan kerangka analisis Robert N. Entman untuk menghasilkan Kesimpulan

media yang digunakan memperlihatkan adanya narasi-narasi yang saling

berhubungan dalam berbagai artikel mengenai permasalahan hutan NTB.

Penelitian terdahulu hanya menggunakan satu media sebagai sumber data,

sementara penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti melibatkan

beberapa media berbeda untuk mengumpulkan informasi. (Rahmat A. F.,

2021). Dalam penelitian sebelumnya ketiga, Muhammad Bahy Rakha pada tahun

2022 dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria Di Desa

Wadas, Purworejo (Studi pada Media Online Vice ID dan Detik.com). 24 59 78 117 124

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan

menerapkan metode Framing Entman. Kesimpulan dari penelitian ini media

Detik.com lebih condong membela pemerintah, dan Vice ID membela warga. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah membahas isu di daerah yang berbeda, serta menggunakan media yang berbeda sebagai sumber data (Rakha, 2022). Kebaruan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian ini membahas mengenai kasus konflik hutan adat Papua, dimana masyarakat Papua memiliki kedekatan dengan hutan adat mereka, yang dianggap sebagai Ibu, dapat diartikan jika hutan ini merupakan sumber pangan dan kebutuhan mereka (Opu, 2021). Peneliti menggunakan media berita online sebagai objek penelitian, dimana peneliti melihat kasus ini melalui kaca mata wartawan atau jurnalis. Terkadang masih ada bias, karena ditulis berdasarkan pengetahuan wartawan.

136 2.2. Teori dan Konsep 8 2.2 1. Jurnalisme Online Richard Craig dalam (Hendraswari, 2016) Jurnalisme Online adalah penyampaian pesan internet dan menggabungkan tulisan, video, audio, dan gambar, serta memungkinkan audiens untuk membaca kembali berita yang telah lalu. Jurnalisme Online banyak keuntungan karena menawarkan berita yang dapat masyarakat, kapan saja, dan di mana saja. Itu juga memungkinkan pembaca untuk memilih berita mana yang akan mereka konsumsi. **52 98** Jurnalisme Online menurut buku Online Journalism: Principles and Practices of News for The Web adalah (Foust, 2017): 1. **37** Audience Control adalah kegiatan yang memberikan keleluasaan audiens dalam memilih berita yang ingin dibaca; **37 106** 2. Nonlienarity adalah setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri, sehingga audiens tidak harus membaca secara berurutan untuk memahami berita tersebut; **37 38 57** 3. Storage and retrieval adalah berita yang tersimpan dapat diakses Kembali dengan mudah oleh para audiens; **37** 4. Unlimited Space adalah jumlah berita yang disampaikan atau dipublikasikan kepada audiens dapat menjadi lebih lengkap daripada media lainnya; **37 98** 5. Immediacy adalah informasi dapat disampaikan dengan cepat dan dapat langsung diterima oleh audiens; **37 38 121** 6. Multimedia Capability adalah tim redaksi mampu menyertakan teks, suara, gambar, dan video, dalam berita yang diunggah; **37** 7. Interactivity adalah peningkatan partisipasi para audiens dalam berita yang dipublikasi; Penelitian ini

fokus pada analisis media online, dengan membandingkan dua platform berita, yaitu Kompas.com sebagai media nasional dan Jerat Papua sebagai media lokal. Kedua platform tersebut dianggap mewakili praktik jurnalisme online yang relevan dengan studi ini . 2.2.2. Media Berita Online

Sumber berita online adalah yang menggunakan internet untuk menyampaikan informasi dan berita terbaru. Pengguna internet juga dapat mengakses media ini (McQuail & Deuze, 2020). Pengembangan cepat internet saat ini, bersama dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, telah mengakibatkan berkembangnya berbagai media yang sebelumnya ada, atau yang biasa disebut sebagai media baru. Sumber-sumber berita online juga muncul dalam ranah media baru ini. Sumber-sumber ini dapat diakses pada perangkat digital dengan akses internet kapan saja dan dari mana saja, dan mereka akan diperbarui secara " real time " untuk memungkinkan anggota audiens berinteraksi secara langsung. (Pamuji, 2019). Dalam media berita online terdapat beberapa jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik seperti (Musman & Mulyadi, 2017):

1. **35 43 69 79 96** Straight News : Jenis berita ini ditulis dengan singkat, langsung, dan lugas. Biasanya, berita semacam ini menjadi berita utama atau muncul secara besar di halaman depan sumber-sumber berita online. 2. Depth News: Juga dikenal sebagai berita mendalam, jenis liputan ini dibuat dengan menyelami lebih dalam suatu topik, membutuhkan penyelidikan, serta informasi dari individu yang hadir di tempat kejadian. 3. Interpretative News: Jenis berita ini dibuat menggunakan pertimbangan atau pendapat jurnalis berdasarkan fakta-fakta baru yang diperoleh. **35 69 77 123** 4. Investigation News: merupakan berita yang dikembangkan dengan melakukan penelitian dan penyelidikan melalui berbagai sumber. **6 69 77 79** 5. Opinion News: merupakan berita yang membahas mengenai pendapat seseorang, orang yang dimintai pendapat juga tidak sembarangan, biasanya mereka adalah sarjana, ahli, cendekiawan, atau pejabat, yang memahami tentang kondisi dan hal lainnya mengenai peristiwa yang dibahas. Objektivitas dan kode etik jurnalistik akan diperlukan untuk pemberian yang akurat dalam membuat sebuah artikel berita. Pandangan dan sikap

mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan alam dan lingkungan bisa dipengaruhi oleh liputan media mengenai konflik hutan adat suku Awyu. Meskipun, pembuatan seseorang tanpa adanya objektivitas pesan, dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti dapat memecah belah antara satu pihak dengan pihak lainnya. Objektivitas ini tergantung pada bagaimana kemampuan media berita online dalam mempublikasi isu agar menjadi tulisan yang memberikan informasi yang jelas dan berimbang, agar tidak memberikan dampak yang buruk bagi audens (Musman & Mulyadi, 2017). Dengan mempertimbangkan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep media berita online ini digunakan dalam penelitian ini karena media berita online merupakan wadah untuk mengetahui serta mempublikasi informasi mengenai pemberitaan konflik hutan adat suku Awyu yang dilakukan oleh media seperti Kompas.com dan Jerat Papua.

2.2.3. Jurnalisme Lingkungan

Definisi jurnalisme lingkungan berakar pada komunikasi lingkungan, komunikasi lingkungan, menurut (Cox & Pezzullo, 2021) jurnalisme lingkungan memiliki peran yang penting dalam menyuarakan isu-isu lingkungan. institusi, individu, komunitas dan budaya membentuk, mentransmisikan, memahami, serta menggunakan pesan mengenai lingkungan itu sendiri, serta mengenai hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Jurnalisme lingkungan mencakup masalah lingkungan internasional, pemanasan global, perubahan iklim, kualitas air, pembakaran liar, pencemaran industry, kebakaran hutan, kekeringan, tanah longsor, banjir, energi nuklir, penggundulan hutan, limbah rumah sakit, limbah rumah tangga, dll. Isu lingkungan ini memerlukan perhatian dalam masa depan, jurnalis, media, dan politisi akan semakin serius dalam memperhatikan dampak kerusakan lingkungan. Peran media dan pemerintah dalam isu lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menyebarkan informasi melalui berbagai media. Untuk menyelamatkan bumi ini, kerjasama dari semua pihak diperlukan dalam publikasi informasi. (Nasution, 2015). Penjelasan ini relevan untuk jurnalisme lingkungan, kelas-kelas komunikasi lingkungan, dan teori komunikasi. Media merupakan

sumber informasi dan pengetahuan penting bagi masyarakat mengenai isu-isu lingkungan di Indonesia. Studi ini mengkaji bagaimana media telah 10 mendingkai liputan mengenai konflik tanah adat suku Awyu, dengan mengacu pada analisis framing Robert N. Entman di Kompas.com dan Jerat Papua untuk mata kuliah komunikasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang berita dan bagaimana Kompas.com dan Jerat Papua menginterpretasikan konflik hutan tradisional antara suku Awyu dan suku Papua.

2.2.3.1. Berita Lingkungan Hidup

Sebuah laporan berita adalah cerita mengenai suatu kejadian, keadaan, pandangan, pola, atau interpretasi yang penting, menarik, dan perlu disampaikan kepada publik saat ini. Pada umumnya sebuah berita harus cepat mencari ide terbaru yang sesuai fakta, menarik, dan penting bagi para pembaca. Semakin sering media menyampaikan isu-isu kerusakan lingkungan hidup, semakin besar pula perbincangan yang terjadi di kalangan masyarakat. Agenda publik dan cara berpikir masyarakat pembicaraan audiens akan tercipta melalui intensitas pemberitaan media terhadap isu-isu tersebut Charnley and James M Neal dalam (Rani, 2014). Berita lingkungan pada dasarnya sama dengan berita umum lainnya, termasuk berita politik, kriminal, dan berita lainnya. Realitas lingkungan yang menjadi dasarnya membedakan berita lingkungan dari jenis berita lainnya. Realitas lingkungan seperti deforestasi, polusi suara dan udara, polusi sampah, polusi industri, dan lain-lain menjadi dasar bagi berita lingkungan (Abrar, 2016). Realitas seperti ini tidak mudah untuk dilacak, sering kali jurnalis keliru dalam mengungkapkan realitas ini, jika seorang jurnalis berhasil dalam mengungkapkan realitas lingkungan hidup, tidak menjamin jika berita mereka akan dipublikasi, karena berita tersebut mengandung konflik kepentingan bagi banyak pihak. Melihat sulitnya proses jurnalisme lingkungan hidup, maka seorang yang meliput mengenai isu ini harus memiliki pengetahuan yang cukup komprehensif mengenai, hubungan alam dan manusia, serta pembangunan dan ekonomi, secara holistik: dampak fisik, cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup dan masih banyak lagi (Abrar, 2016). Maka

dapat disimpulkan jika berita lingkungan hidup menjadi sarana untuk berbagai informasi mengenai permasalahan lingkungan, yang dapat membantu memberikan pesan edukasi mengenai lingkungan yang ditunjukkan untuk khalayak luas. Berita lingkungan juga dapat menggambarkan bagaimana keadaan lingkungan yang sedang terjadi, serta sarana untuk mengetahui permasalahan-permasalahan lingkungan yang sedang terjadi. 2.2.3.2. Ruang Lingkup Pemberitaan Lingkungan Kelalaian manusia sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan. Media dapat membantu memulihkan kerusakan lingkungan dengan menyiarkan berita yang menyoroti masalah lingkungan. Menilai kerusakan lingkungan sering kali sulit karena wilayahnya yang luas dan jarak yang jauh. Sebagai hasilnya, banyak kelompok yang peduli lingkungan turut serta dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan. Terkadang, mereka bahkan membantu menyebarkan pengetahuan lingkungan melalui media sosial (Sudiby, 2014). Sayangnya saat ini banyak media yang tidak tuntas dalam memberikan pemberitaan mengenai isu lingkungan hidup, artinya audiens tidak mendapatkan informasi yang mendalam. 11 Karena realitas lingkungan hidup membutuhkan solusi, namun, yang terjadi pada media saat ini hanya menawarkan solusi seadanya, atau secara formalitas untuk melengkapi berita saja. Saat ini media lebih senang mengangkat isu lain seperti politik dan entertainment (Abrar, 2016). Terdapat berbagai metode jurnalistik yang dapat menyoroti isu lingkungan dan mendukung keberlanjutan kehidupan.. Salah satunya adalah dengan menulis berita yang fokus pada pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam penulisan berita, penting untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai isu-isu lingkungan yang sedang terjadi. Selain itu, jurnalis juga dapat menggunakan pendekatan yang mengedepankan solusi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, penulisan berita dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi mendatang (Abrar, 2016). Berdasarkan penjelasan yang diberikan, pembahasan penelitian tentang kerangka pelaporan

menghubungkannya dengan ruang lingkup lingkungan. Analisis framing Robert N. Entman mengenai konflik suku Awyu di Kompas.com dan Jerat Papua.

2.2.3.2. Nilai Berita dalam Pemberitaan Lingkungan Jurnalisme adalah praktik bercerita dengan tujuan tertentu, di mana berita menjadi sarana untuk menyampaikan pesan dari jurnalis kepada pembaca. 131 Ada tema yang

diangkat dari sebuah kejadian atau peristiwa. Dalam berita terdapat karakteristik intrinsic yang dikenal sebagai nilai berita, nilai berita ini menjadi ukuran berguna atau tidaknya informasi tersebut (Ishwara, 2011). Begitu pula dalam berita lingkungan perlu memiliki nilai berita, nilai berita yang harus ada dalam berita lingkungan adalah (Yopp, McAdams, & Thornburg, 2014): 1. Prominence Berita lingkungan yang didalamnya berisikan orang terkenal akan lebih mendapatkan perhatian dari audiens. 2. Timeliness Berita lingkungan yang mengandung kebaruan dan aktualitas akan memberikan informasi yang baru bagi audiens. 3.

Proximity Berita lingkungan yang memiliki unsur kedekatan dengan para audiens, baik dari segi tempat lokasi pelaku, atau lokasi pemberitaan akan lebih menarik bagi audiens. 4. Impact Berita lingkungan yang memiliki dampak akan membuat audiens tertarik. 5. Magnitude Berita lingkungan yang memiliki skala, atau ukuran dari sebuah peristiwa akan lebih menarik perhatian masyarakat 6. Conflict Berita lingkungan yang mengandung kontroversi pro dan kontra akan lebih disukai oleh audiens, karena lebih menarik. 7. Oddity Berita lingkungan yang mengandung unsur keunikan di dalamnya akan menarik perhatian audiens. 12 8. Human Interest Tidak dapat dipungkiri jika audiens kita memang mudah untuk menarik simpati pada hal-hal yang berbau kemanusiaan, begitu juga dengan berita lingkungan, jika berita tersebut mengandung unsur yang memberikan emosi, dan rasa kemanusiaan audiens, maka akan semakin diminati. 58 9. Significance

Berita yang layak diberitakan adalah informasi yang dianggap penting oleh publik atau audiens sekurang-kurangnya memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada kehidupan publik. Misalnya, diketahui bahwa Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengunjungi cabang tertentu. Meskipun kunjungan

ini merupakan peristiwa (informasi), tidak selalu penting bagi publik. Tidak dibolehkannya pencairan pensiun mungkin menarik perhatian pembaca karena berkaitan dengan kehidupan mereka. Terdapat keterhubungan antara penelitian yang perlu dilakukan dan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, demikianlah bisa dikatakan. Penelitian ini memiliki nilai berita karena menantang cara konflik antara suku Awyu asli dan media, Kompas.com dan Jerat Papua, telah diframing. Menurut analisis framing Robert N. Entman, sebuah cerita harus memiliki nilai berita di dalamnya agar dianggap layak untuk dipublikasikan.

2.2.3. Kepemilikan dan Kebijakan Redaksional

Kebijakan redaksional adalah salah satu landasan bagi lembaga media massa dalam menentukan berita yang layak dipublikasikan, kebijakan redaksi berfungsi sebagai panduan dalam merespon dan menyikapi peristiwa. Hal ini menunjukkan jika berita bukan hanya sekedar laporan peristiwa, tapi juga menjadi cerminan sikap media terhadap peristiwa tersebut (Benazir, 2015). Menurut Haris Sumadiria dari (Benazir, 2015) mengatakan jika dalam kebanyakan kasus, kebijakan redaksional berfokus pada bagaimana elemen dan tujuan yang ideal ditampilkan dan didistribusikan dalam berita, artikel, dan lain-lain harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat yang beragam. Kebijakan redaksional menjadi ciri khas dari setiap media. Tanpa kebijakan editorial, berita yang disampaikan akan menjadi tidak konsisten dan terus berubah-ubah.

101 Kompas.com adalah situs berita online yang dikelola oleh PT Kompas Cyber Media, anak perusahaan, dan salah satu media yang dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Kompas.com merupakan salah satu media online terkemuka di Indonesia, dan dinobatkan sebagai pemimpin sektor media online di negara ini untuk tahun 2022 (Catrina & Sukmana, 2023).

71 Kompas.com juga ikut mempublikasi mengenai berita lingkungan, karena media ini memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang mendorong publik melakukan tindakan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup. Dengan infastruktur yang luas dan beragam, Kompas dapat menyediakan berita yang melimpah dan menyeluruh, termasuk berita lingkungan. Selain

itu, Kompas.com juga memiliki fitur personalisasi yang memperbolehkan pembaca mengatur berita yang mereka inginkan, termasuk berita lingkungan. Kompas.com juga menyediakan berita lingkungan seperti polusi udara, kebijakan lingkungan, dan kasus lingkungan yang terjadi (Catrina & Sukmana, 2023). 13 Media lokal yang menjadi fokus dalam studi ini adalah Jerat Papua, sebuah platform yang dikelola oleh sekelompok individu yang dipimpin oleh Y.P. Yarangga dan Engelbert Dimara. Jerat Papua didirikan dengan tujuan untuk memberitakan tentang masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok marginal seperti masyarakat adat, yang masih banyak terjadi di Papua. Berbasis di Jayapura, Provinsi Papua, media ini mengangkat berbagai isu terkait (SDA) dan Hak Ekonomi di Papua (Papua, 2024). Penelitian ini menggunakan media Kompas.com dan Jerat Papua karena kedua platform ini adalah media yang dimiliki oleh perusahaan swasta., hal ini 1. mempengaruhi proses pembentukan kebijakan redaksional dari kedua media tersebut.. Kebijakan redaksional tersebut akan menentukan bagaimana setiap media menggambarkan dan menampilkan peristiwa.

2.2.5. Konstruksi Realitas Media Media memiliki tujuan dan alasan khusus dalam menyajikan berita. Ide-ide yang ingin Anda komunikasikan kepada audiens dapat tercermin dalam motif ini. Pada intinya, manusia mampu memahami pesan dari media dan memiliki harapan. Proses mental yang terkait dengan kognisi dapat mempengaruhi perubahan dalam perilaku, sikap, dan pandangan dunia seseorang. Selain itu, media memiliki peran penting dalam menyampaikan berita yang aktual dan benar, namun mereka juga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai pada pemirsa mereka (Chairani & Kania, 2014). Menurut Berger dan Luckman dalam (Bungin, 2020) realitas adalah kualitas yang ada dalam fenomena-fenomena yang memiliki eksistensi yang tidak tergantung pada keinginan kita, sedangkan konstruksi sosial adalah proses di mana eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi terjadi antara individu dalam masyarakat. Proses ini secara bertahap membentuk pemahaman bersama, kesadaran kolektif, perspektif publik, dan konsep. Berger dan Luckman menjelaskan ini dalam karyanya. (Bungin,

2020) menjelaskan terdapat tiga bentuk realitas sosial yaitu: 1. **62** Realitas simbolis, adalah lambang realitas objektif dalam berbagai bentuk 2. **62 86 111** Realitas objektif, realitas yang dianggap sebagai kenyataan dan terbentuk dari pengamatan di dunia objektif yang berasal dari luar diri individu. **36 62 78 84 86 115** 3. Realitas subjektif, adalah bentuk dari penyerapan kembali realitas objektif dan simbol ke dalam diri individu melalui proses internalisasi. Hal Media menyampaikan akumulasi mengenai pengaruh yang beragam, menurut Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam (Krisdinanto, 2014) terdapat memiliki lima faktor yang mempengaruhi redaksi ketika mengambil keputusan:

1. Ideological Level adalah kerangka yang digunakan individu untuk melihat realitas dan bagaimana cara menghadapinya. **51 59 67 81** 2. Extramedia Level adalah pengaruh-pengaruh yang berasal dari sumber berita, pengiklan, penonton, pemerintah, teknologi, pangsa pasar, dan public relation . **51** 3. Organization Level adalah struktur manajemen organisasi media, level ini lebih berpengaruh dari pada dua level sebelumnya. **51 59 67 80 81** 4. Media Routines Level pengemasan media, dimana rutinitas ini terbentuk dari tiga unsur yaitu, organisasi media (processor), sumber berita (suppliers) , dan khalayak (consumers). **51 67** 5. Individual Level adalah karakteristik individual pekerja media mempengaruhi baik secara perilaku personal atau profesional, dan hal ini mempengaruhi isi media. 14 Tujuan konstruksi realitas oleh media massa adalah untuk menarik perhatian audiens terhadap konsep suatu peristiwa. Seringkali terjadi bahwa pemirsa mendapatkan informasi dari media yang tidak akurat, sehingga pemirsa membentuk pendapat mereka berdasarkan apa yang disajikan oleh media (Panuju, 2018). Dalam penelitian ini digunakan media Kompas.com dan Jerat Papua, yang merupakan media online yang beroperasi dibawah naungan swasta, hal ini tentunya mempengaruhi bagaimana kebijakan redaksional dari kedua media tersebut. Kebijakan redaksional akan membentuk cara kedua media tersebut membingkai, serta menyajikan sebuah peristiwa menjadi suatu pemberitaan.

2.2.6. Framing Framing adalah strategi studi yang digunakan untuk mengetahui pendapatan dan sudut pandang media saat menyajikan informasi tentang suatu topik atau fenomena lokal. Media

yang dimaksud dapat terdiri dari jurnalis atau wartawan, dan materi yang diterima disajikan kepada publik setelah diframing (Eriyanto 2015). Berdasarkan model dan konsep, analisis framing dibagi menjadi beberapa model dan konsep, dimana model dan konsep ini telah dicetuskan oleh beberapa pakar-pakar di dunia. Model yang dicetuskan oleh pakar Robert N. Entman melibatkan beberapa tahap seleksi, termasuk aspek realitas, dimana bagian tertentu lebih ditonjolkan dibandingkan dengan bagian lainnya, untuk menghasilkan sebuah cerita (Eriyanto 2015). Ada juga paradigma analisis framing yang dikembangkan oleh seorang spesialis global lainnya, William A. Gamson. Menurut Gamson, framing adalah metode terorganisir untuk menghasilkan narasi atau kumpulan konsep yang akhirnya membentuk sebuah konstruksi. Struktur tersebut cenderung berkaitan erat dengan topik pembicaraan, padahal bisa dilihat bahwa perannya sebagai perspective influencer cukup kuat. Cerita tersebut kemudian dikemas dalam berbagai perspektif yang membentuk cerita melalui makna pesannya. Lebih lanjut, Todd Gitlin, sebagai salah satu ahli lainnya, menyatakan bahwa analisis kerangka kerja memiliki konsep. Konsep ini melibatkan bagaimana strategi yang dibuat dapat membuat sebuah cerita lebih mudah bagi penonton untuk menarik kesimpulan. Dengan menonjolkan bagian-bagian yang benar-benar menarik dapat merangsang minat masyarakat untuk berkonsumsi. Tentunya telah melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap pemilihan, tahap pengulangan, tahap penekanan dan paparan yang disampaikan melalui perspektif realitas (Eriyanto 2015). Selain itu, ada ahli lainnya yaitu David E. Snow dan Robert Benford, yang bersama-sama menciptakan konsep analisis bingkai. Menurut Snow dan Benford, analisis framing adalah sistem multi langkah yang dilakukan untuk mendapatkan makna atau interpretasi dari suatu masalah atau fenomena yang signifikan. Mereka berpendapat bahwa makna Frame dalam kata Framing sangat erat kaitannya dengan sistem kepercayaan khlayak dan bagaimana aspek informasi tertentu dapat mempengaruhinya secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Framing tidak perlu membutuhkan informasi yang panjang, namun jika konten

informasinya lengkap dan sesuai dengan target audience, mereka akan menginterpretasikan informasi tersebut sesuai perspektif mereka (Nabila, 2021). Analisis framing Entman digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi realitas yang, dengan menyoroti definisi dari semua perangkat terhubung yang membentuk konsep utama dari sebuah teks, membuat realitas tertentu lebih menonjol dalam teks komunikasi. 15 Karakteristik tertentu menjadi lebih mencolok, diingat, dan signifikan bagi audiens ketika mereka diulang atau ditempatkan dengan prominens dalam berita (Eriyanto 2015). Dengan memilih dan menekankan aspek-aspek tertentu dari kebenaran, framing media akan menyederhanakan realitas dan memudahkan pemirsa untuk memahaminya. Pemilihan aspek yang menonjol ini dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan (a) definisi dari realitas; (b) identitas asal masalah; (c) klaim moral yang dibuat; dan (d) rekomendasi yang diajukan. Entman memiliki empat perangkat diantaranya (a) Define Problem atau dikenal dengan pendefinisian masalah; 18 (b) Diagnose Causes atau dikenal sebagai sumber masalah; (c) Make Moral Judgment atau dikenal sebagai membuat Keputusan moral; (d) Treatment Recommendation atau dikenal dengan menekankan penyelesaian masalah (Eriyanto 2018). 12 Penelitian ini menggunakan metode analisis framing dari Robert N. Entman untuk melihat bagaimana sebuah penonjolan isu. Dalam konteks berbagai realitas yang tersedia, melihat bagaimana wartawan memilih untuk menyoroti jenis aspek yang akan dimasukkan dalam berita dan mengesampingkan yang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek dari suatu peristiwa akan diangkat dalam berita; wartawan memilih untuk menampilkan elemen-elemen tertentu saja. Penonjolan isu ini sangat berhubungan dengan bagaimana fakta-fakta disusun dalam cerita, yaitu melalui pilihan kata-kata, kalimat, dan gambar yang tepat untuk menyampaikan cerita tentang peristiwa tersebut kepada publik.

2.2.7. Konflik Lingkungan Hidup Sebagai Realitas Pemberitaan

Konflik dalam liputan lingkungan dapat timbul dari persaingan atas pengelolaan dan penggunaan hutan dan lahan. Masalah ini sering muncul dalam interaksi antara penduduk lokal dan kawasan hutan negara tentang

pembentukan kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan, atau antara penduduk dan pihak yang memiliki izin di sektor kehutanan. Komunitas-komunitas dapat bertentangan dalam klaim terhadap wilayah, termasuk tanah, air, dan laut, serta batas desa. Ini karena tidak ada cukup ruang untuk pertambangan. Konflik antarkomunitas dapat memiliki dampak yang baik maupun buruk. Selain itu, ada masalah habitat hewan yang terancam punah yang terancam oleh operasi pertambangan, yang perlu ditangani (Nazra, 2022). Ini menyoroti pentingnya masalah lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu konsekuensi signifikan dari tindakan manusia adalah degradasi lingkungan yang cepat, yang diperparah oleh kemajuan teknologi. Penting untuk menerapkan langkah-langkah kuat untuk melindungi lingkungan ini dari pengaruh-pengaruh eksternal. Saat ini, upaya pembangunan global secara utama berpusat pada kepedulian ini (Nazra, 2022). Secara teoritis, konflik yang berkaitan dengan sumber daya menimbulkan berbagai perubahan dan transisi dalam masyarakat. Konflik mengenai lingkungan memiliki potensi untuk berkembang menjadi konflik internasional, termasuk perang. Di masyarakat kontemporer, konflik-konflik ini juga dapat berwujud sebagai polusi lingkungan dan pasokan air. Konflik mengenai lingkungan sering kali melibatkan berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan dan sektor pembangunan (Baiquni & Rijanta, 2023). Kebijakan hutan memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal dan menghasilkan devisa, namun juga memiliki risiko merusak lingkungan dan sumber daya alam serta memarginalkan suku-suku pedalaman yang selama ini telah mendapat manfaat dari pengelolaan hutan. Selain itu, penyitaan hutan adat Awyu dianggap sebagai contoh konflik lingkungan karena terkait dengan investasi yang dilakukan oleh bisnis untuk mengambil alih ruang hutan adat. 16 Kebijakan lingkungan yang menyebabkan konflik biasanya diselesaikan dengan memberikan kompensasi, misalnya melalui program penghijauan kembali dan pengembangan desa hutan (Baiquni & Rijanta, 2023). Penelitian ini menggunakan konsep Konflik Lingkungan Hidup Sebagai Realitas Pemberitaan karena, untuk mengetahui

bagaimana konflik lingkungan hidup sebagai realitas berita yang dilakukan oleh media online Kompas.com dan Jerat Papua dalam memberitakan konflik Hutan Adat Awyu Papua periode Maret 2023 – Juni 2024. 2.2 **116** 8. Konflik Tanah Adat Pasal 5 Undang-Undang Dasar Agraria tahun 1960 menyatakan bahwa hukum adat mengatur bumi, laut, dan angkasa. Sistem kepemilikan tanah kolektif atau komunal diakui dalam Pasal 17, namun penerapan hukum adat hanya diakui sejauh tidak mengganggu kepentingan nasional. Peraturan adat dapat dibatalkan jika diperlukan untuk melayani kepentingan nasional. Politik hukum pemerintah, daripada hukum pemerintah, memiliki dampak terhadap perubahan dalam masyarakat yang diperintah oleh hukum adat. Jika reformasi hukum dan politik dalam pemerintah tidak dilakukan, masyarakat akan berubah dengan cepat atau lambat, yang berarti bahwa pada suatu titik dalam evolusinya tidak akan ada masyarakat sama sekali. (Rahmah, 2017). Berdasarkan data dari Detik.com, menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), di Indonesia masih marak kasus perampasan tanah Adat, sejak 2019 hingga 2023 tercatat ada 301 kasus perampasan tanah, dan perampasan tanah ini banyak dilakukan oleh perusahaan yang melakukan eksplorasi sumber daya. Dengan banyaknya kasus tersebut bukan tidak mungkin terjadi konflik (Ariadi, 2023). Konflik ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti, adanya perubahan pola pikir masyarakat, dari sebelumnya komunal menjadi individualistis, dari komunal menuju religius. Juga terjadi karena perubahan pemaknaan konsep, dari penguasaan menuju kepemilikan, adanya kekeliruan ini untuk memaknai konsep yang digunakan dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), yang diambil melalui konsep masyarakat adat yang telah diturunkan secara turun temurun. Meningkatnya nilai ekonomi tanah yang terjadi secara signifikan pada suatu daerah, terkadang juga membuat orang asal menjual tanahnya tanpa membuat persetujuan, atau tanah dijual oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus konflik suku Awyu dianggap sebagai konflik agraria atau tanah adat karena terjadi perluasan lahan perkebunan sawit yang mengakibatkan hutan adat suku Awyu terancam hilang, dan konflik ini menyangkut ha

katas lahan, hutan adat, dan ruang hidup suku Awyu yang sangat bergantung pada hasil kekayaan hutan. (Suwirta, 2020). Untuk menentukan bagaimana konflik tanah adat dikemas oleh media online Kompas.com dan Jerat Papua dalam melaporkan konflik Hutan Adat Awyu Papua untuk periode Maret 2023 hingga Juni 2024, penelitian ini menggunakan konsep konflik tanah adat sebagai realitas pelaporan. 17 2.3. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir penelitian ini, berangkat dari sebuah fenomena konflik tanah adat suku Awyu Papua, yang kemudian melihat sebuah pemberitaan konflik tanah adat suku Awyu Papua pada portal media online Kompas.com dan Jerat Papua. Kemudian dari fenomena tersebut mendapat rumusan masalah yaitu, bagaimana pembingkaihan konflik suku adat Awyu Papua pada Kompas.com dan Jerat Papua. Kemudian mendapatkan konsep dalam penelitian tersebut yaitu jurnalisme online, media online, jurnalisme lingkungan, konstruksi realitas media, framing dan konflik lingkungan. Penelitian ini menggunakan analisis framing Robert N. Entman, dan kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana Pembingkaihan Pemberitaan Konflik Hutan Adat Suku Awyu Papua Pada Media Kompas.com dan Jerat Papua. 127 Gambar 2. 127 1 Kerangka Berpikir (Sumber: Olahan Peneliti) 18 19 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian

Para peneliti mengaplikasikan penelitian kualitatif dalam studi mereka. Teknik pengumpulan informasi di suatu setting tertentu untuk memahami peristiwa yang terjadi dikenal sebagai penelitian kualitatif. Pendekatan ini merupakan alat yang berguna dalam konteks ini, dan pengumpulan data yang bertujuan. (Anggito & Setiawan, 2018). 113 Cara pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan triangulasi, yang menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data. Fokus utama dari analisis data dalam karya ini adalah menafsirkan generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018). Karena hasil penelitian kualitatif tidak dihasilkan menggunakan teknik statistik atau pendekatan kuantitatif lainnya, para peneliti dapat lebih memahami fenomena yang diberikan dengan menggunakan pendekatan naturalistik. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam bidang-bidang sosial. (Anggito

& Setiawan, 2018). Penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivis, di mana realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dan dinamis yang terkait erat dengan konteksnya. Realitas sosial tidak hanya ditentukan oleh hubungan sebab-akibat semata, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, tindakan manusia bukanlah hasil dari proses yang bersifat otomatis, melainkan merupakan hasil dari pilihan yang dibuat oleh individu berdasarkan interpretasi dan pemaknaan mereka sendiri. (Rahardjo, 2018). Sosiolog interpretatif Peter L. Berger pertama kali memperkenalkan paradigma konstruktivisme. Menurut pandangannya, realitas adalah sesuatu yang dibuat atau dikonstruksi daripada sesuatu yang muncul secara spontan. Oleh karena itu, karena setiap orang memiliki perspektif unik terhadap realitas, realitas tersebut dapat dikatakan memiliki banyak wajah atau bersifat plural. (Eriyanto 2015). Paradigma ini mengevaluasi jurnalis, media, dan berita yang mereka liput. Paradigma konstruktivisme berpendapat bahwa peristiwa dan fakta adalah kreasi relatif yang memiliki makna dalam situasi tertentu. Karena media dipandang sebagai agen konstruksi, berita dibangun secara subjektif daripada mencerminkan realitas. (Eriyanto 2015). Para konstruktivis melihat jurnalis tidak hanya sebagai penyingkap informasi tetapi juga sebagai pembentuk realitas. Dalam mengintegrasikan etika, moralitas, dan partisan ke dalam proses pembuatan berita, peran jurnalis sangat penting. Selain itu, penilaian moral, etika, dan ideal peneliti merupakan elemen penting dalam studi ini. Selain itu, persepsi audiens terhadap berita bervariasi. (Eriyanto 2015). **13** Penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivisme karena dianggap dapat mengatasi rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dengan menggunakan paradigma ini, yang dianggap paling akurat dalam menjelaskan topik atau isu yang dibahas serta mengkarakterisasi berita, sesuai dengan teori framing Robert N. Entman. 3.2. **122** Metode Penelitian Analisis framing akan menjadi metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. 20 Analisis framing pada dasarnya merupakan teknik penjelasan yang menyajikan kebenaran tentang suatu kejadian atau

peristiwa secara halus daripada menolaknya secara langsung. Hal ini dilakukan dengan menguraikan berbagai detail, menggunakan bahasa yang tepat dan menjelaskan makna tertentu, serta dengan menggunakan gambar, teks, dan materi ilustratif lainnya (Suhaimah, 2019). Salah satu jenis analisis teks yang berfokus pada konstruksi pesan adalah analisis framing. Metode ini digunakan untuk menentukan bagaimana jurnalis mengumpulkan berita sebelum menyampaikannya kepada publik, serta bagaimana media mengelaborasi fakta atau peristiwa (Bungin, 2020). 16 31 125 Analisis framing yang dikemukakan oleh Robert N. Entman akan digunakan dalam penelitian ini. Entman mengemukakan bahwa framing menyoroti dua fitur utama dalam metode ini. Analisis ini menggunakan prosedur untuk memilih dari berbagai realitas spesifik. Ada berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses peningkatan pemberitaan berita terkait. fenomena konflik suku adat Awyu Papua pada media Kompas.com dan Jerat Papua. Perbedaan peningkatan adalah hal yang dapat terjadi antara satu media dengan media lainnya. Peneliti menggunakan analisis framing dengan tujuan untuk memahami bagaimana wartawan mempresentasikan suatu isu atau peristiwa pada media online khususnya media Kompas.com dan Jerat Papua mengkonstruksikan maupun mengelola sebuah realitas pemberitaan terkait fenomena konflik suku adat Awyu Papua. 3.3.

13 Unit Analisis Unit yang sedang diselidiki, yang dapat berupa individu, objek, kelompok, atau situasi kejadian sosial di mana penelitian dilakukan dalam bentuk tindakan individu dari suatu kelompok. Kegiatan atau tindakan peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dari organisasi, individu, atau pihak lain yang dapat memberikan pemahaman terhadap penelitian yang sedang dilakukan merupakan unit analisis (Eriyanto 2015). Unit analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengenai pemberitaan konflik tanah adat Awyu Papua. Peneliti melakukan analisis terhadap pemberitaan khusus yang memiliki struktur lengkap dalam empat dimensi. Robert N. Entman menggunakan analisis framing yang mencakup definisi, pembelajaran, evaluasi, dan komunikasi dalam memahami berita tersebut (Eriyanto 2015). Studi ini memanfaatkan platform berita

online Kompas.com dan Jerat Papua yang memiliki sistem pers yang berbeda. Terdapat 22 berita yang menjadi fokus penelitian, dengan judul artikel dari Kompas.com dan Jerat Papua sebagai unit analisis: 21 Tabel

3. 1Tabel Judul Berita No Artikel Kompas.com Artikel Jerat Papua 1 “Suku Awyu Papua Datangi Komnas HAM Minta Masalah Penyerobotan Hutan Adat Ditangani Serius (9 Mei 2023) “Suku Awyu Gugat PTPS Provinsi Papua, Buntut di Keluarkan Ijin Lingkungan Hidup Perkebunan Sawit (13 Maret 2023) 2 “Terima Suku Awyu, Komnas HAM Akan Buat Tim Kajian Khusus Konflik Agraria di Papua Setelan (10 Mei 2023) “Perjuangan Masyarakat Adat Awyu, Peringatan Keras Perubahan Iklim Dunia (15 Maret 2023) 3 “Pejuang Lingkungan Hidup Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Ini Sebabnya (10 Mei 2023) “Frenky Woro: Tanah Adalah Rekening Pribadi Bagi Kami Masyarakat Adat Awyu (16 Maret 2023) 4 “Tak Hanya ke PTUN Jakarta, Suku Awyu Adukan Masalah Tanah ke Komnas HAM (10 Mei 2023) “Masyarakat Adat Awyu Keberatan Jika Sidang Awal di Lakukan Secara Elektronik (13 April 2023) 5 “Tanahnya Diserobot, Suku Awyu Mengadu ke Komnas HAM, Ini Hasilnya (11 Mei 2023) “Pejuang Lingkungan Hidup Dari Suku Awyu Ajukan Permohonan Intervensi Ke Ptun Jakarta (11 Mei 2023) 6 “Perwakilan Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Bagaimana Kelanjutannya? (11 Mei 2023) “Saksi Ungkap Sejumlah Fakta Sengketa Lahan Suku Awyu & PT IAL di Bovernt Diegol (28 Juli 2023) 7 “PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit (03 November 2023) “Peringatan HIMAS 09 Agustus 2023 “Orang Muda Papua Bersatu Menjaga dan Melindungi Hak-hak Masyarakat Adat, Kelestarian Hutan Hujan Untuk Keadilan Antar Generasi dan Keadaan Iklim (09 Agustus 2023) 8 “Saat Hakum PTUN Jarapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Kelapa Sawit (03 November 2023) “PTUN Jakarta Tolak Gugatan Perusahaan Sawit, Perjuangan Suku Awyu Menang di Harapkan Masyarakat Adat Kepada Pemerintah (6 September 2023) 9 “IAL Kantongi Konsensi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua (03 Juni 2024) “Menunggu Putusan PTUN Jayapura atas Gugatan Masyarakat Adat Awyu (25 Oktober 2023) 10 “Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di Balik Seruan “All Eyes on Papua (04 Juni 2024)” “Putusan PTUN Jayapura Jadi Kemundurkan Pelindungan Masyarakat

Adat Awyu dan Lingkungan Hidup 11 “Musyawarah Besar Masyarakat Adat Suku Awyu Hasilkan 7 Kesepakatan Untuk Penyelamatan Manusia, Tanah dan Hutan (11 Desember 2023)

12 “Suku Awyu: Kami Akan Mempertahankan Tanah dan Hutan Sebagai Budaya dan Kehidupan Kami (11 Desember 2023) Sumber: (Eriyanto 2015) Adapun

periode pengambilan unit analisis penelitian ini disesuaikan dengan periode viralitas dari pemberitaan fenomena tersebut di portal berita online ,

yakni Maret 2023 – Juni 22 2024. Jerat Papua jauh lebih dul

u memberitakan mengenai isu ini, karena Jerat Papua merupakan media lokal yang berada di Papua, sehingga lebih mudah menjangkau kawasan konflik, atau memiliki nilai berita proximity. 3.4. Teknik Pengumpulan

Data Untuk mengatasi topik penelitian yang sedang diselidiki, data yang relevan sangat penting dalam melakukan penelitian. Penyusunan topik

penelitian yang tepat memerlukan penggunaan prosedur yang benar dalam pengumpulan data. Penelitian dengan data yang valid dan relevan akan

lebih efektif ketika pendekatan pengumpulan data yang tepat digunakan. Tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang benar, oleh

karena itu metode pengumpulan data perlu dilakukan dengan baik. (Hardani, 2020). 23 53

91 103 126 Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Untuk data primer, peneliti

menggunakan studi dokumentasi serta metodologi pengumpulan data. Data yang digunakan dalam dokumentasi berasal dari bahan tertulis atau produk-produk.

Dengan pendekatan ini, peneliti memeriksa data yang telah dikumpulkan

sebelumnya untuk mendapatkan data primer. (Sugiyono, 2016). 3.4 56 1. Data Primer

Studi dokumentasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya. 56 74 114 Menurut (Sugiyono, 2016),

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam berbagai

bentuk, mulai dari tulisan hingga gambar. 56 74 90 Dokumen yang berbentuk

tulisan bisa berupa catatan harian atau sejarah, biografi, peraturan,

dan lain-lain, dokumen yang berbentuk gambar bisa berupa foto, sketsa,

dan lain-lain, dan dokumen yang berbentuk karya-karya monumental bisa

berupa film, patung, dan lain-lain.. Data primer diaplikasikan dalam metode

penelitian ini adalah dokumen yang didapat dari artikel-artikel dari dua media berita yang digunakan sebagai unit analisis, yaitu media Kompas.com dan Jerat Papua, yang berisikan membahas mengenai konflik suku Awyu di Papua. 3.4.2. Data Sekunder Cara pengumpulan data sekunder juga diaplikasikan dalam penelitian ini. 11 Bahan bacaan seperti buku, jurnal, atau studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini menjadi sumber utama data sekunder untuk penelitian ini. Sebagai hasilnya, data asli yang digunakan dalam penelitian ini dapat didukung dan diperkuat oleh data sekunder yang dikumpulkan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini akan menggunakan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data. Artikel berita mengenai konflik tanah adat suku Awyu Papua yang dikumpulkan antara Maret 2023 dan Juni 2024 dari media lokal Jerat Papua dan portal berita online nasional Kompas.com menjadi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini.

23 3.5. Metode Pengujian Data Pengujian data adalah salah satu langkah dalam proses penelitian. Untuk menentukan keakuratan data yang digunakan, teknik pengujian data harus diterapkan. Memverifikasi kebenaran data dapat menjadi alasan mengapa penelitian dapat dijelaskan dengan tepat dari berbagai sudut pandang (Moleong, 2018). Menurut Moleong, data dapat dikatakan absah bila:

1. Data yang digunakan benar dan sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Data yang digunakan dikumpulkan dengan metode yang benar dan sesuai.
3. Data yang digunakan telah dilakukan pemeriksaan untuk memeriksa apakah data yang digunakan benar dan sesuai dengan tujuan penelitian.
4. Data yang digunakan telah dilakukan pemeriksaan untuk memeriksa apakah data yang digunakan dikumpulkan dengan metode yang benar dan sesuai.
5. Data yang digunakan telah dilakukan pemeriksaan untuk memeriksa apakah data yang digunakan memenuhi standar kualitas data yang diperlukan. Pada dasarnya, untuk memastikan kualitas dan keaslian data yang digunakan dalam penelitian diperlukan proses kritis yang disebut validasi keabsahan data. 92 Empat kriteria — kepercayaan (credibility), transferabilitas (transferability), ketergantungan (dependability), dan konfirmabilitas (confirmability) — dapat digunakan untuk menilai

keabsahan data yang digunakan dalam studi ini. (Moleong, 2018): 1. Transferability:

Persamaan antara konteks pengirim dan penerima menjadi prioritas dalam uji ini. Untuk mencapai kesamaan konteks, peneliti perlu menemukan kejadian yang terjadi dalam pengaturan yang sama. Tugas peneliti adalah memberikan informasi deskriptif yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan untuk menentukan apakah melakukan transfer tersebut tepat.. 2.

Dependability Harap dicatat bahwa proses penelitian menghasilkan hasil yang konsisten untuk studi ini. Karena peristiwa atau fakta terkait perselisihan yang tercatat adalah benar, penelitian ini dapat dipercaya.

Jika penelitian yang sama dilakukan lagi oleh peneliti yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. (Bungin, 2020). Kedua pengujian data ini dipilih karena mengandung aspek keteralihan (transferability) dalam penelitian ini, akan menghasilkan kesimpulan, yang akan digunakan menjadi data untuk melanjutkan penelitian sejenis oleh pihak lain yang memerlukan data atau penjelasan yang berhubungan dengan penelitian sejenis.

Selanjutnya ketergantungan (dependability) yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga dapat diuji dari pada keseluruhan data yang diperoleh melalui media online yang telah peneliti peroleh, yang berhubungan dengan fenomena konflik tanah adat suku Awyu Papua. Data tersebut diambil melalui sumber terpercaya yaitu kedua media yang dijadikan sebagai objek perbandingan penelitian, yaitu media Kompas.com dan Jerat Papua.

24 3.6. Metode Analisis Data Metode analisis data merupakan proses pengolahan data untuk mengembangkan kesimpulan yang ada di tahap akhir penelitian. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengembangan dan menjawab tantangan dari penelitian. Analisis data merupakan suatu langkah yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang lebih jelas dan mengembangkan refleksi secara terlalu realistis terhadap data dengan melakukan pengujian berbagai pertanyaan analisis dan melakukan penyesuaian singkat selama proses penelitian (Cresswell, 2014). 103 129 Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data yang terbagi menjadi dua yaitu: 1. Proses pemeriksaan data

kelengkapan data yang dikeluarkan oleh media Kompas.com dan Jerat Papua 2. 4 10 16 61 72

112 Proses analisis data, dilakukan dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman yang memiliki empat elemen sebagai berikut: Tabel 3. 4 16 2

Tabel model analisis framing Robert N. Entman Elemen Unit yang diamati Define Problem (Pendefinisian Masalah) Bagaimana melihat sebuah peristiwa/isu? 4

16 25 29 44 55 64 75 Sebagai apa? 4 12 16 22 25 26 29 42 44 55 64 73 75 76 109

Sebagai masalah apa? 4 5 11 12 16 22 24 25 26 29 42 43 44 64 68 72 73 75 76 109

Diagnoses Causes (Memperkirakan penyebab masalah) Peristiwa tersebut disebabkan oleh apa? 4 5 6 10 11 12 13 15 16 18 22 23 24 25 26 28 29 30 31 36 38 41 42

43 44 45 47 52 57 64 65 68 72 99 104 Siapa/apa (aktor) yang dianggap sebagai permasalahan peristiwa tersebut? 4 5 6 10 11 12 13 15 16 18 22 23 24 25 26 28 29 30 31

36 38 41 42 43 44 45 47 50 52 53 57 63 64 68 72 73 94 Make Moral Judgment (Penilaian Moral) Nilai moral apa yang ada untuk menjelaskan masalah? 4 5 6 10 11 12 13

15 18 22 23 24 25 26 28 29 30 31 36 41 42 43 44 45 47 52 57 63 64 Nilai moral apa yang digunakan untuk mengintimidasi sebuah tindakan? 4 5 6 10 11 12 15 18 22 23 24 25

26 28 29 30 31 36 41 42 44 45 47 52 63 64 Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan sebuah peristiwa/isu? 4 5

10 11 12 15 16 18 22 23 24 25 26 28 29 30 31 35 36 41 42 44 45 47 50 52 53 55 57 61 63

65 73 100 109 Jalan apa yang ditawarkan untuk ditempuh? 4 11 76 Sumber: (Eriyanto 2015) Dalam metode framing model Entman, metode pertama adalah define problems (pendefinisian masalah), elemen ini digunakan wartawan untuk membingkai sebuah berita, elemen ini memberikan bagaimana sebuah peristiwa ditonjolkan oleh wartawan. Elemen ini merupakan elemen petama yang ada di framing. Dimana elemen ini adalah bingkai utama, yang berisikan peristiwa oleh wartawan. (Eriyanto 2015). 55 Elemen kedua yaitu diagnose causes , elemen ini merupakan elemen yang memperkirakan masalah atau sumber masalah. 10

12 15 16 18 22 23 25 26 28 31 33 35 36 38 41 43 44 45 50 53 55 61 63 66 70 75 88 120

128 Peristiwa tersebut disebabkan oleh apa? 10 12 15 16 18 22 23 25 26 28 30 31 33

35 36 38 41 43 44 45 50 53 55 61 63 66 70 75 88 120 128 Apa yang menjadi penyebab masalah? 10 12 15 16 18 22 23 25 26 28 30 31 33 35 38 41 44 50 53 55 61 63 66

70 75 88 120 Siapa (aktor) yang mengakibatkan masalah? 4 6 10 11 12 13 15 16 18 22

23 24 25 26 28 29 30 31 35 38 41 42 50 57 61 62 65 66 70 75 80 84 88 99 100 108

Diagnose causes (memperkirakan sumber masalah), merupakan elemen yang digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari sebuah peristiwa (Eriyanto 2015). 4 5 10 11 12 13 15 16 18 22 23 24 25 26 28 29 30 35 36 38 43 45 47 50 53 55 65 66 68 70 93 94 Elemen ketiga make moral judgement, elemen ini bertujuan untuk menonjolkan nilai moral apa yang disajikan, untuk menjelaskan sebuah masalah dalam peristiwa? 4 5 6 10 11 12 13 15 16 18 22 23 24 28 29 30 31 33 35 36 41 42 43 44 45 47 50 52 53 55 61 63 65 66 68 73 Apa nilai moral yang digunakan melegitimasi suatu tindakan? Dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu, dan menyajikan informasi secara ringkas dan jelas, maka khalayak akan lebih mudah memahami makna, menarik minat, dan mengingatnya (Eriyanto 2015). 4 35 93 Elemen keempat atau elemen terakhir menekankan mengenai treatment recommendation. Pada elemen ini akan mengetahui bagaimana penyelesaian masalah yang ditawarkan. Penyelesaian masalah ini sangat bergantung terhadap bagaimana sebuah peristiwa 25 dimaknai, sesuai dengan sudut pandang yang ingin disampaikan (Eriyanto 2015). Menurut Sobur Akbar, yang dikutip melalui (Aswinaputra, 2023) kemudian dalam melakukan analisis data, peneliti akan melakukan beberapa tahap sebagai berikut: 1. Peneliti membaca kembali berita yang menjadi unit observasi pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan mengkategorikan berdasarkan tanggal penerbitan berita tersebut. 2. Peneliti melihat bagaimana wartawan mendefinisikan masalah. Karena itu peneliti akan melihat bagaimana sebuah peristiwa diseleksi dan dilihat sebagai masalah oleh wartawan. 3. Peneliti akan melihat bagaimana seorang wartawan menjabarkan perkiraan masalah atau sumber masalah. 10 13 15 Dalam tahapan ini peneliti akan mengamati bagaimana penyebab masalah dari sebuah peristiwa atau siapa aktor yang menyebabkan masalah. 4. Peneliti melihat bagaimana seorang wartawan menyajikan nilai moral dalam menjelaskan masalah. Nilai moral apa yang digunakan dalam mengimplementasi sebuah tindakan yang ditawarkan. 5. Peneliti melihat penekanan penyelesaian masalah yang ditawarkan kemudian dikaitkan dengan permasalahan sebagai hasil dari seleksi isu. 6. Selanjutnyam peneliti akan membandingkan framing antara Kompas.com dan

Jerat Papua, kemudian dikaitkan dengan karakteristik media nasional dan lokal. Peneliti menggunakan analisis framing model Robert N. Entman karena untuk mengetahui bagaimana media berita mengkonstruksikan dan membingkai realitas berita mengenai konflik tersebut, dalam penelitian ini, analisis framing akan digunakan untuk meneliti bagaimana media berita mengidentifikasi masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat pilihan moral, dan menekankan penyelesaian. 3.7. Keterbatasan Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidaklah sempurna. Ada beberapa keterbatasan, seperti fokus pada perbandingan antara media online nasional (Kompas.com) dan lokal (Jerat Papua) yang keduanya merupakan media tidak berbayar. 6 47 72 117 130

133 26 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian Pada bab ini peneliti akan memberikan penjelasan singkat tentang profil kedua media online yang digunakan dalam penelitian yaitu, Kompas.com dan Jerat Papua. Sebagian sumber yang dijadikan referensi diambil dari situs/ website kedua media online . Serta situs lain yang dapat dipercaya.

4.1.1. Kompas.com Gambar 4. 5 6 34 82 85 1. Logo Kompas.com (Kompas.com) Kompas.com, salah satu perusahaan media online pertama di Indonesia, didirikan sebagai Kompas Online pada tanggal 14 September 1995.

5 6 33 34 39 46 49 82 89 Situs ini awalnya didedikasikan untuk memberikan akses kepada pembaca harian Kompas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. 5 6 33 34 39 46 49 Sebagai hasilnya, pembaca di Indonesia bagian timur dan luar bisa menikmati berita harian Kompas pada hari yang sama tanpa harus menunggu sehari-hari seperti yang biasanya (Catrina & Sukmana, 2023). 5 33 34 39 46 49 Pada awal tahun 1996,

Kompas Online mengubah alamatnya menjadi www.kompas.com, yang membuat situs ini lebih populer di kalangan pembaca harian Kompas di luar negeri. 5 6 39 49 73

85 89 119 Pada tanggal 6 Agustus 1998, Kompas Online berkembang menjadi unit bisnis yang mandiri di bawah PT Kompas Cyber Media (KCM). 12 33 34 39 46 Sebagai hasilnya, pengunjung KCM tidak hanya dapat mengakses replika harian Kompas, tetapi juga mendapatkan pembaruan berita terbaru sepanjang hari. Penggunaan Internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, dan KCM

mengikuti tren ini dengan meningkatkan diri. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, KCM melakukan perubahan dan pada tanggal 29 Mei 2008, situs ini melakukan rebranding menjadi Kompas.com. Dengan langkah ini, portal berita ini menegaskan komitmennya untuk menjadi standar jurnalisme yang berkualitas di tengah arus informasi yang sering tidak jelas kebenarannya. Kanal berita diperluas, dan penyajian berita ditingkatkan untuk memberikan informasi yang terkini dan relevan kepada pembaca (Catrina & Sukmana, 2023). 71 Kompas.com juga mempublikasi mengenai berita lingkungan, karena media ini memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang mendorong publik melakukan tindakan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup. Dengan infastruktur yang luas dan beragam, Kompas dapat menyediakan berita yang melimpah dan menyeluruh, termasuk berita lingkungan. Selain itu, Kompas.com juga memiliki fitur personalisasi yang memperbolehkan pembaca mengatur berita yang mereka inginkan, termasuk berita lingkungan. Kompas.com juga menyediakan berita lingkungan seperti polusi udara, kebijakan lingkungan, dan kasus 27 lingkungan yang terjadi (Fatonah, 2023).

4.1.2. Jerat Papua Gambar 4.

2. Logo Jerat Papua (jeratpapua.org) Jerat Papua merupakan media yang dijalankan oleh sekelompok orang yang dikepalai oleh Y.P Yarangga dan Engelbert Dimara pada tahun 2008. Dimana pembentukan ini karena pada tahun 1976 terdapat perusahaan seperti pertambangan, dimana masyarakat adat cenderung dipinggirkan padahal mereka adalah pemilik hutan, disaat yang sama pembangunan ini juga menciptakan konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah (Papua, 2024). Ada banyak penyalahgunaan sumber daya alam yang telah merusak kehidupan masyarakat adat, keanekaragaman hayati, ekosistem, dan menyebabkan kemiskinan secara sistematis, serta merusak nilai-nilai budaya masyarakat adat. Jerat adalah nama yang dipilih sebagai simbol alat penangkap yang ramah lingkungan, yang telah lama digunakan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Alat ini biasanya memiliki karakter yang kuat dan kokoh. 110 Visi Jerat adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

masyarakat adat dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan budaya (Papua, 2024). Papua Jerat Papua terbentuk karena ingin memberitakan mengenai kaum marginal seperti masyarakat adat, yang masih banyak terjadi di Papua. Media ini berdiri di Jayapura – Provinsi Papua, media ini merupakan media yang membahas mengenai isu Sumber Daya Alam (SDA) dan Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya, yang ada di Papua (Papua, 2024).

4.2. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian ini menganalisis analisis 10 artikel berita dari Kompas.com terlebih dahulu, setelahnya analisis 12 artikel berita dari Jerat Papua. Analisis berita dilakukan dengan menggunakan perangkat framing Entman. Karena itu, sebelumnya akan diberikan penjelasan secara singkat mengenai artikel terkait yang akan dianalisis sesuai dengan elemen Entman.

4.2.1. Analisis Artikel Berita Kompas.com

1. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

a. Analisis Berita 1

Judul : “Suku Awyu Papua Datangi Komnas HAM, Minta Masalah Penyerobotan Hutan Adat Ditangani Serius
Sumber : Kompas.com Tanggal : Sabtu, 6 Mei 2023 Ringkasan :

Berita yang berjudul tersebut berisi tentang perwakilan suku Awyu yang mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena deforestasi di wilayah mereka semakin meluas setelah adanya perusahaan perkebunan sawit.

Tabel 4. 1. Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

Elemen Hasil Define Problem (Pendefinisian Masalah) Suku Awyu meminta masalah penyerobotan hutan adat ditangani secara serius.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Masih banyaknya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terkait bidang agraria, di wilayah suku Awyu yang tidak diselesaikan secara adil.

Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya menjaga kelestarian hutan adat yang merupakan tempat masyarakat Awyu menggantungkan hidupnya.

Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Masyarakat Awyu membawa kasus ini ke jalur hukum karena mengancam kelestarian hutan adat dan ruang lingkup suku Awyu.

Rincian Analisis 1.

Define Problem Melihat dari element define problem, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada suku Awyu yang meminta pemerintah untuk menangani penyerobotan hutan adat secara serius. Hal ini

dicerminikan dari judul berita tersebut, serta hal ini diperkuat dengan banyaknya pengulangan kata masyarakat Awyu mendesak Komnas HAM untuk serius menangani hal ini, serta pernyataan Franky sebagai perwakilan suku Awyu yang memohon kepada Komnas HAM untuk meminta penanganan secara serius. 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, sumber masalah menurut Kompas.com adalah banyaknya pelanggaran HAM mengenai agraria yang terjadi di wilayah suku Awyu. Hal ini diperkuat dengan adanya kutipan yang dikatakan oleh Franky selaku perwakilan suku Awyu jika di tempatnya deforestasi semakin meningkat.

7 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya menjaga kelestarian hutan adat Awyu Papua, dimana hal diperkuat dengan pernyataan Franky yang mengatakan laju deforestasi di tempat mereka semakin meluas setelah datangnya perusahaan perkebunan sawit. Padahal hutan adat merupakan tempat suku Awyu menggantungkan hidup. Serta didukung dengan kutipan dari Franky yang berkata jika hutan mereka digusur, akan kemana mereka? 2 7 20

32 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , Kompas.com upaya penyelesaian yang diusulkan 29 dianggap sebagai masalah hukum berupa Masyarakat membawa kasus ini ke jalur hukum, yang berkaitan dengan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Papua. 2. Analisis Media Nasional (Kompas.com) b. Analisis Berita 2 Judul : “Terima Suku Awyu, Komnas HAM Akan Buat Tim Kajian Khusus Konflik Agraria di Papua Selatan Sumber : Kompas.com Tanggal : Kamis, 10 Mei 2023 Ringkasan : Terkait dengan sengketa agraria yang dilaporkan oleh suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berencana membentuk tim khusus studi. Dengan tujuan menyusun rekomendasi yang sesuai dan memenuhi keinginan suku Awyu, Komnas HAM akan melakukan studi khusus mengenai evaluasi ekonomi hutan dan masyarakat adat. Hasil investigasi ini diharapkan memberikan pemahaman umum kepada pemerintah Boven Digoel, Papua Selatan, mengenai konflik agraria dan pentingnya penyelesaiannya.

97 Konflik pertanian terjadi antara suku Awyu dengan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, menurut Hendrikus Franky Woro, juru bicara suku tersebut. Franky percaya bahwa izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Papua Investment dan One Door Open Services mengancam hutan adat dan area tempat tinggal mereka. Pada tanggal 13 Maret 2023, Franky mengajukan kasus lingkungan dan perubahan iklim kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Tabel 4. 2. Analisis Artikel Berita 2 Kompas.com Elemen Hasil Define Problem (Pendefinisian Masalah) Komnas HAM akan membuat tim kajian khusus untuk menangani Konflik Agraria di Papua Selatan. Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Kekhawatiran warga akan terpecahnya suku Awyu karena adanya konflik agraria. Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Perlindungan hutan sebagai lingkungan hidup dan identitas sosial budaya suku Awyu. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Mengajukan gugatan ke jalur hukum. Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada Komnas HAM akan membuat tim kajian khusus untuk menangani konflik agraria di Papua Selatan. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan Gambaran kepada pemerintah mengenai dampak dari konflik agrarian terhadap masyarakat suku Awyu, termasuk 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen ini merujuk pada, sumber masalah menurut Kompas.com adalah adanya kekhawatiran terjadinya perpecahan antar suku Awyu, karena adanya konflik agraria dengan perusahaan yang akan membangun perkebunan sawit di tanah adat suku Awyu. Berdasarkan pernyataan dari Franky yang mendesak agar Komnas HAM membentuk tim agar dapat memberikan solusi atas konflik agraria yang terjadi di wilayah suku Awyu, agar tidak terjadi perpecahan antar suku. 30 3. Make Moral Judgment Dilhat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai perlindungan lingkungan hidup, hal ini diperkuat dengan agrumen Ujar franky. Hal ini menunjukkan jika hutan masih menjadi hal penting bagi masyarakat Papua, karena mereka masih

menggantungkan hidupnya dari hutan yang mereka miliki, serta diperkuat dengan kutipan kedua Kalimat tersebut menyimpulkan jika perlu adanya perlindungan hutan adat suku Awyu sebagai lingkungan hidup dan identitas sosial budaya mereka. 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Kompas.com upaya penyelesaian yang diusulkan adalah membawa ke jalur hukum. 7 48 Hal

ini ditunjukkan dari kata-kata dalam berita yang berisikan kalimat 19 50 “Selain ke Komnas HAM, Franky juga telah mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 13 Maret 2023 1 3.

Analisis Media Nasional (Kompas.com) c. Analisis Berita 3 Judul :

Perjuangan Lingkungan Hidup Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Ini

Sebabnya Sumber : Kompas.com Tanggal : Kamis, 10 Mei 2023 Ringkasan :

Aktivis lingkungan Awyu mengajukan petisi sebagai tergugat dalam kasus korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN).

Informasi ini dilaporkan dalam berita. Perjuangan suku Awyu untuk melindungi hak dan kepentingannya terhadap tuntutan hukum

perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan melalui aplikasi ini. Tujuan dari persidangan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Papua bukanlah tanah kosong dan untuk menjaga hutan tradisional dan daerah hunian mereka, yang terancam akibat izin konversi hutan terbesar dan pertumbuhan cepat industri perkebunan kelapa sawit. Tabel 4. 3. Analisis Artikel Berita

3 Kompas.com Elemen Hasil Define Problem (Pendefinisian Masalah) Perjuangan masyarakat Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka (Ketidak Adilan). Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Pentingnya perlindungan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Meski belum diakui masyarakat Awyu tetap datang ke Jakarta Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita ini. Rincian Analisis 1. Define Problem 31 Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah Perjuangan

suku Awyu untuk mempertahankan hak-hak mereka dari kepentingan korporasi menjadi isu penting di Papua. Baru-baru ini, perwakilan Awyu melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menegaskan bahwa tanah air mereka bukanlah tanah terlantar, menantang narasi yang dapat melemahkan klaim mereka atas tanah dan sumber daya alam. Upaya ini menggarisbawahi pertarungan mereka yang berkelanjutan untuk melindungi wilayah mereka dari kepentingan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, menunjukkan adanya konflik lebih luas terkait penggunaan tanah dan hak-hak pribumi.

2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, milih masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan dari kasus ini. 1 Hal ini diperkuat dengan 5 “Hendrikus "Franky" Woro, seorang pejuang lingkungan dari suku Awyu, menjelaskan bahwa tujuan dari persidangan tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa Papua bukanlah tanah kosong. Serta Keluhan ini terkait dengan izin lingkungan yang diterima oleh perusahaan PT Indo Asiana Lestari (IAL), yang juga berbasis di Boven Digoel, Papua Selatan, dari Kantor Investasi dan Layanan Satu Pintu Provinsi Papua. 2 5 8 12 Dimana perizinan yang dimiliki sejumlah perusahaan sawit ini akan mengancam hutan adat dan ruang hidup masyarakat Awyu.

3. Make Moral Judgment Saat mengkaji komponen penilaian moral, Kompas.com menyimpulkan bahwa dalam hal ini, pilihan moral adalah pentingnya menjaga dan mempertahankan hutan adat serta wilayah penduduk pribumi. 2 5 12 "Menurut Franky, izin untuk sejumlah perusahaan kelapa sawit mengancam hutan adat mereka dan ruang hidup," menjadi bukti lebih lanjut mengenai hal ini. Karena suku Awyu bergantung pada hutan ini untuk kelangsungan hidup mereka dan karena hal ini sesuai dengan hak asasi manusia mereka.

4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation, dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Kompas.com dalam berita ini tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan mengenai perjuangan masyarakat adat Awyu yang mengajukan permohonan sebagai tergugat.

4. Analisis Media Nasional (Kompas.com) d. Analisis Berita 4 Judul : “Tak Hanya ke PTUN Jakarta,

Suku Awyu Adukan Masalah Tanah ke Komnas HAM Sumber : Kompas.com Tanggal :
Jum'at 11 Mei 2023 Ringkasan : Anggota komunitas pribumi suku Awyu
serta tim hukum mereka mengadukan pelanggaran hak-hak yang dialami
komunitas pribumi suku Awyu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

1 Saat pertemuan tersebut, Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dan
Hari Kurniawan mengumumkan partisipasi mereka dalam mengajukan permohonan
amicus curiae untuk intervensi komunitas suku Awyu. Mereka datang untuk
membagikan kisah pelanggaran hak yang dialami oleh komunitas suku Awyu.
Suku Awyu harus terlibat dalam litigasi untuk melindungi hak-hak mereka
karena hal ini akan memengaruhi gaya hidup mereka. 1 3 7 14 Pada tanggal 13
Maret, Franky juga mengajukan gugatan di PTUN Jayapura terkait masalah
lingkungan dan perubahan iklim. 1 3 14 20 21 27 32 40 60 Keluhan ini terkait
dengan izin lingkungan yang diperoleh oleh PT Indo Asiana 32 Lestari
(IAL), yang berbasis di Boven Digoel, Papua Selatan, dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua. Franky mengklaim bahwa
izin-izin yang dimiliki oleh beberapa perusahaan kelapa sawit mengancam
hutan adat dan area tempat tinggal mereka. Tabel 4. 4. Analisis
Artikel Berita 4 Kompas.com Elemen Hasil Define Problem (Pendefinisian
Masalah) Perjuangan masyarakat Awyu mempertahankan hutan adat mereka dari
perampasan perusahaan kelapa sawit. Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab
Masalah) Masyarakat adat awyu yang menghadapi ancaman kerusakan lingkungan
akibat korporasi. Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya
mengelola serta melindungi hutan adat dan ruang hidup masyarakat adat.
Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Tidak adanya informasi
mengenai penyelesaian masalah yang diberikan. Rincian Analisis 1. Define
Problem Menurut Kompas.com dalam artikel berita ini, masalahnya adalah
tentang perjuangan suku Awyu untuk melindungi hak-hak dan kepentingan
mereka dari tuntutan hukum korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT
Kartika Cipta Pratama. Perwakilan dari suku Awyu memberikan kesaksian di
pengadilan mengenai pelanggaran hak yang mereka alami, yang lebih
menguatkan hal ini. 2. Diagnose Causes Berdasarkan faktor diagnosa

masalah, yang berhubungan dengan definisi masalah, Kompas.com menyatakan bahwa ancaman kerusakan lingkungan adalah akar masalah bagi komunitas suku Awyu. Franky, juru bicara suku Awyu, menyatakan bahwa meskipun kami tidak diakui secara resmi, kami telah melakukan perjalanan jauh ke Jakarta untuk membela hutan-hutan kami dari korporasi yang ingin menghancurkannya. 3. Make Moral Judgment Dilhat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya melindungi serta mengelola hutan adat dan ruang lingkup masyarakat adat.

91 Karena, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. 1 132 Gagasan pendukung

5 14 “Gugatan kedua perusahaan itu akan berdampak kepada kehidupan suku Awyu, pihaknya harus terlibat untuk mempertahankan hak-haknya 1 132 .

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dilihat jika kedua perusahaan sawit tersebut memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Awyu, karena mereka masih menggantungkan kehidupan sehar-harinya melalui hutan adat mereka. 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Kompas.com tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan mengenai perjuangan masyarakat adat Awyu yang mengajukan meminta komna HAM. 5. Analisis Media Nasional (Kompas.com) e. Analisis Berita 5 33 Judul : Tanah Diserobot, Suku Awyu Mengadu ke Komnas HAM, Ini Hasilnya Sumber : Kompas.com Tanggal : Jum’at 11 Mei 2023 Ringkasan : Berita yang berjudul “Tanah Diserobot, Suku Awyu Mengadu ke Komnas HAM, Ini Hasilnya tersebut berisi tentang perjuangan masyarakat adat suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka terhadap kasus perampasan tanah hutan adat yang merupakan hak masyarakat adat suku Awyu. Masyarakat adat suku Awyu berjumpa dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengisahkan perampasan tanah hutan adat yang merupakan hak masyarakat adat suku Awyu. 1 Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM menyatakan bahwa mereka akan mengajukan amicus curiae (sahabat pengadilan) dalam permohonan intervensi masyarakat adat suku Awyu. Amicus curiae adalah opini ahli tentang suatu kasus untuk memberikan pendapatnya agar hakim memiliki pandangan lebih terbuka terhadap kasus

tersebut. Komnas HAM juga akan menindaklanjuti dengan meneliti dan mengkaji lebih dalam kasus yang dialami suku adat Awyu. **1 3 14 21 54 87** Selain itu, perwakilan masyarakat adat suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan, mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). **1 3** Permohonan tersebut merupakan kelanjutan dari perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka dari gugatan kedua korporasi di atas. Tabel 4. 5. Analisis Artikel Berita 5 Kompas.com Elemen Hasil Define Problem (Pendefinisian Masalah) Perjuangan masyarakat Awyu untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka (Masalah ketidakadilan). Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Adanya perampasan hutan adat milik suku Awyu. Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya mengelola serta melindungi hutan adat dan ruang hidup masyarakat adat. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Melakukan transparansi dalam memberikan izin kepada perusahaan yang bersinggungan dengan masyarakat sekitar (Membawa kasus ke pengadilan). Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada perjuangan suku Awyu yang membela hak dan kepentingan mereka dari gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Hal tercermin dari judul berita “Tanah Diserobot, Suku Awyu Mengadu ke Komnas HAM, ini Hasilnya . 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah karena adanya perampasan hutan adat milik suku Awyu oleh korporasi, karena itu mereka datang dan mengadu ke komnas HAM untuk mengisahkan perampasan hutan adat yang merupakan hak mereka. 3. Make Moral Judgment Dilhat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya melindungi serta mengelola hutan adat dan ruang lingkup masyarakat adat. **91** Karena, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini diperkuat dengan gagasan yang diberikan oleh Franky Woro selaku perwakilan suku Awyu, yang mengatakan jika mereka

datang jauh-jauh ke Jakarta untuk mendukung pemerintah 34 melindungi hutan dari perusahaan yang ingin merusak. 4. Treatment Recommendation

Dilihat dari elemen treatment recommendation, dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Kompas.com upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa memberikan transparansi kepada masyarakat adat terkait perizinan lingkungan perusahaan. Hal ini karena berita ini lebih fokus pada perjuangan masyarakat adat Awyu melawan perusahaan yang mengancam hutan dan hak-hak mereka, serta upaya mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan transparansi dalam proses perizinan. 6. Analisis Media Nasional (Kompas.com) f. Analisis Berita 6 Judul : Perwakilan Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Bagaimana Kelanjutannya? Sumber : Kompas.com Tanggal : Jum'at 11 Mei 2023 Ringkasan : Berita yang berjudul "Perwakilan Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Bagaimana Kelanjutannya" **1 3 14 21 40 54** tersebut berisi Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). **1 3** Mereka mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai kelanjutan dari perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka terkait penyerobotan tanah hutan adat dari gugatan kedua korporasi tersebut. Kuasa Hukum Masyarakat Adat Suku Awyu, Sekar Banjaran Aji, mengungkapkan bahwa setelah permohonan intervensi diterima, maka mereka akan masuk dalam proses persidangan. Sekar juga mengungkapkan bahwa proses tersebut akan berjalan seperti persidangan biasanya dan pihaknya akan dilibatkan dalam hal itu. Tabel 4. 6. Analisis Artikel Berita 6 Kompas.com Elemen Hasil Define Problem (Pendefinisian Masalah) Perjuangan masyarakat Awyu untuk melindungi hak dan kepentingan mereka (Masalah ketidakadilan). Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Adanya penyerobotan hutan adat masyarakat Awyu Papua yang dilakukan oleh PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya keadilan dan perlindungan hutan, serta transparansi ijin

perusahaan kepada masyarakat adat. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Mengajukan intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap KLHK (Membawa kasus ke jalur hukum). Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada perjuangan suku Awyu yang membela hak dan kepentingan mereka dari penyerobotan hutan adat oleh korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Hal ini dicerminkan dari judul artikel “Perwakilan Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Bagaimana Kelanjutannya ¹ Karena itu masyarakat Awyu mengajukan permohonan intervensi dalam gugatan korporasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 35 (LHK), untuk mempertahankan hak yang mereka miliki. 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah karena adanya penyerobotan hutan adat oleh korporasi, yang dapat mengancam kehidupan dan hak-hak masyarakat adat suku Awyu di Papua Selatan. Karena itu masyarakat Awyu mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi, hal ini menjadi tindakan lanjut dari suku Awyu untuk membela hak mereka. 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya melindungi hak dan kepentingan masyarakat dari penyerobotan hutan adat dari gugatan korporasi, serta memperlihatkan informasi yang jelas dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, karena mereka adalah pemilik tanah. 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Kompas.com upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa mengajukan intervensi dalam gugatan korporasi terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dimana mereka mengajukan permohonan ini ke untuk membela hak dan kepentingan mereka terkait penyerobotan hutan. 7. Analisis Media Nasional (Kompas.com) g. Analisis Berita 7 Judul : PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit

Sumber : Kompas.com Tanggal : Jum'at 3 November 2023 Ringkasan : Berita yang berjudul "PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit tersebut berisi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Papua atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari. 1 2 3 7 9 14 20 21 27 32 40 60 83

Gugatan ini diajukan oleh pejuang lingkungan dari suku Awyu, Hendrikus Woro, yang menggugat izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL). 2 8 17 20 27 95

Hendrikus menggugat izin lingkungan PT IAL karena diperkirakan akan memicu deforestasi di hutan alam kering primer yang luasnya mencapai 26.326 hektare, serta potensi emisi karbon yang lepas jika deforestasi terjadi setidaknya mencapai 23 juta ton karbon dioksida. Dalam putusannya, hakim menyatakan tidak dapat mempertimbangkan prosedur penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 2 8 9 17 19 102

Hakim menilai, AMDAL tersebut bukan bagian dari obyek sengketa dalam perkara, yakni SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua tentang izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL. 2 8

9 17 19 Anggota tim kuasa hukum suku Awyu, Tigor Hutapea, menilai bahwa hakim juga keliru mempertimbangkan telah terjadi partisipasi bermakna hanya menggunakan sebuah surat dukungan investasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel. Tigor mengatakan bahwa LMA tidak merepresentasikan masyarakat adat Awyu dan marga Woro, serta tidak punya hak untuk menyetujui pelepasan hutan milik masyarakat adat. 2 8 9 19

Anggota tim kuasa hukum suku Awyu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, berencana melakukan banding karena perkara 36 tersebut menyangkut hak-hak masyarakat adat Papua yang telah diabaikan dan dilanggar. Emanuel juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum untuk mengevaluasi sikap hakim dalam memutus perkara ini. Tabel 4. 7. Analisis

Artikel Berita 7 Kompas.com Elemen Hasil Define Problem (Pendefinisian Masalah) PTUN Jayapura menolak gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Papua (Ketidak pastian penyelesaian kasus penyerobotan tanah adat) . Diagnose

Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Putusan yang dikeluarkan hakim membuat masyarakat Awyu kecewa. . Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya mengelola serta melindungi hutan adat dan mempertahankan hak-hak masyarakat. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita ini. Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Papua atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (PT IAL), hal ini tercermin dari judul artikel “PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit . 9 17 19 Karena hakim tidak dapat mempertimbangkan AMDAL, dan AMDAL ini dinilai bukan bagian dari obyek sengketa perkara. 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah masyarakat suku Adat Awyu yang kecewa dengan putusan PTUN Jayapura yang menolak gugatan terhadap Pemprov Papua atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup bagi PT IAL. Padahal pengeluaran izin bagi PT IAL akan memicu deforestasi di hutan alam. 10 13

45 "Saya sedih dan kecewa sekali karena yang saya perjuangkan seperti sia-sia. 10 Namun saya tidak akan pernah mundur, saya akan terus maju, 8 kata Hendrikus dikutip dari siaran pers Greenpeace Indonesia. 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya melindungi serta mengelola hutan adat dan ruang lingkup masyarakat adat. 91 Karena, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. 2 8 17 Hal ini diperkuat dengan gagasan yang diberikan oleh Franky Woro selaku perwakilan suku Awyu, yang mengatakan jika dia siap mati demi tanahnya 10 13 45 “Saya siap mati demi tanah saya, karena itu yang tete nene leluhur wariskan untuk saya," imbuhnya”, dan dia tidak akan menyerah mempertahankan tanah adatnya. Serta dengan dibiarkannya perusahaan beroperasi maka akan memicu deforestasi gutan dan akan menambah tingkat emisi karbon. 4. Treatment Recommendation Dilihat dari

elemen treatment recommendation , dalam pembedakan berita yang dilakukan oleh Kompas.com dalam berita ini tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya 37 menjelaskan PTUN Jayapura yang menolak gugatan masyarakat suku Awyu.

1 8. Analisis Media Nasional (Kompas.com) h. Analisis Berita 8 Judul : Saat Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit Sumber : Kompas.com Tanggal : Jum'at 03 November 2023 Ringkasan : Berita yang berjudul "Saat Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit" tersebut berisi tentang Majelis Hakim PTUN Jayapura memutuskan menolak gugatan pemimpin warga Woro, Hendrikus Woro, terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektare. 1 9 Hakim menolak gugatan dengan alasan bahwa SK Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Papua tentang izin kelayakan perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari telah sesuai secara prosedur dan tidak bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik. 1 Kuasa hukum penggugat Hendrikus Woro dari Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, mengatakan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan tujuan memperjuangkan kasus ini sampai menang demi hijaunya hutan Papua, kehidupan masyarakat adat serta menahan laju krisis iklim.

Tabel 4. 8. Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com Elemen Hasil

Define Problem (Pendefinisian Masalah) Penolakan gugatan pemimpin warga Woro terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit (Masalah hukum).

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Majelis Hakim PTUN Jayapura yang menolak gugatan pemimpin suku Awyu. Dimana pemerintah menjadi aktor penyebab karena memberikan ketidakjelasan hukum, yang mengakibatkan suku Awyu menjadi korban pelanggaran HAM.

Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya transparansi dan keadilan sosial bagi masyarakat suku Awyu. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita ini. Rincian Analisis 1. 1 Define Problem Dilihat dari

element define problem, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah

pada penolakan gugatan pemimpin warga Woro, Hendrikus Woro, terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektare. Hakim PTUN Jayapura memutuskan menolak gugatan penggugat, penggugat intervensi 1 dan penggugat intervensi 2, serta menghukum mereka untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000. 9 Keputusan ini disebabkan oleh hakim yang tidak mempertimbangkan prosedur dan substansi Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) karena disebut bukan objek sengketa. 1 38 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah karena Penyebab masalah dalam berita tersebut terkait dengan keputusan Majelis Hakim PTUN Jayapura yang menolak gugatan pemimpin warga Woro, Hendrikus Woro, terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektare. Gugatan ini berisi klaim bahwa izin perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari tidak sesuai dengan asas kearifan lokal, kelestarian, kehati-hatian, dan keadilan. 1 9 34 Hakim dalam putusan tersebut menolak gugatan ini dengan alasan bahwa telah terdapat penilaian atau pengujian terhadap Amdal oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau Kepala Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, sehingga asas-asas tersebut telah diejawantahkan dalam Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi hasil uji kelayakan. 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya transparansi dan keadilan sosial. Karena Keputusan yang diberikan tidak mempertimbangkan aspek keadilan sosial yang akan berdampak pada ancaman terhadap hutan dan masyarakat Adat. 1 9 Hal ini diperkuat dengan gagasan yang diberikan Sekar selaku kuasa hukum suku Awyu ""Bayangkan hakim tidak bisa mempertimbangkan prosedur dan substansi Amdal karena disebut bukan obyek sengketa," ujar Sekar kepada BBC News Indonesia. "Padahal obyek sengketa berupa surat keputusan Kepala Dinas PTSP Provinsi Papua tidak akan keluar tanpa isi Amdal," sambungnya. 1 10 13 "Kami kecewa dengan putusan hakim dan akan memperjuangkan kasus ini sampai menang, demi hijaunya hutan Papua, kehidupan masyarakat adat

serta menahan laju krisis iklim," tegas Sekar ” 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Kompas.com dalam berita ini tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan Hakim PTUN Jayapura memutuskan menolak gugatan penggugat. 9. Analisis Media Nasional (Kompas.com) i. Analisis Berita 9 Judul : IAL Kantongi Konsensi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua Sumber : Kompas.com Tanggal : Senin 03 Juni 2024 Ringkasan : Berita yang berjudul “IAL Kantongi Konsensi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua” tersebut berisi tentang Suku Awyu dan Moi dari Papua meminta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat mereka. 20 35 41 Mereka menggelar aksi damai di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, untuk meminta perlindungan hak-hak mereka yang dirampas oleh izin perusahaan sawit. 17 24 31 36 40 41 42 53 Masyarakat Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Moi di Sorong, Papua Barat Daya, telah berjuang sejak 2023 untuk mempertahankan hutan adat mereka. Mereka menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hak hidup dan lingkungan. 16 24 25 35 36 37 46 Berjuang atas hak hidup dan lingkungan, mereka menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL) yang berada di hutan adat marga Woro-woro, bagian dari suku Awyu Perjuangan masyarakat adat Papua ini telah 39 dilakukan sejak 2023 dan telah mencapai tahap kasasi di MA. 31 43 54 Mereka berharap MA dapat mengabulkan kasasi tersebut sehingga hutan yang diwariskan turun-temurun tetap terjaga. Peralnya, kehadiran hutan dan tanah adat telah dijadikan sebagai pusat penghidupan bagi mayoritas masyarakat adat di Papua. Mereka berburu, berkebun, membangun rumah, mengolah pangan, hingga menghasilkan obat-obatan di sana. Tabel 4. 9. Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com Elemen Hasil Define Problem (Pendefinisian Masalah) Perjuangan masyarakat adat Suku Awyu dan Moi Papua untuk mempertahankan hutan adat mereka (Masalah Ketidakadilan).

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Perusahaan sawit yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat Awyu dan Moi di Papua, sehingga mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Dalam hal ini masyarakat Awyu menjadi korban dari ketidak pastian hukum, dan kepentingan perusahaan. Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Masyarakat Adat Papua berhak mendapatkan keadilan. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Meminta mahkamah Agung agar membatalkan izin perusahaan. Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada perjuangan masyarakat adat Suku Awyu dan Moi di Papua untuk mempertahankan hutan adat mereka dari alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Hal ini tercermin dari judul berita “IAL Kantongi Konsensi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua”. Suku Awyu dan Moi menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hak-hak mereka dan lingkungan hidup yang telah diwariskan turun- temurun. Berbagai upaya hukum telah dilakukan, termasuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, untuk membatalkan izin perusahaan sawit yang mengancam hutan adat mereka. Mereka berharap agar hakim dapat mengedepankan aspek keadilan lingkungan dan iklim serta memulihkan hak-hak mereka yang dirampas. 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah karena tanah adat milik masyarakat adat Awyu dan Moi diakui oleh perusahaan, sehingga hal tersebut mengancam kelestarian lingkungan, karena Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup kepada PT. [11](#) [44](#) Indo Asiana Lestari (IAL) dengan konsensi lingkungan setengah luas DKI Jakarta atau 36.094 hektar. [17](#) [18](#) [27](#) [31](#) [37](#) [42](#) [43](#) Karena itu mereka meminta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengancam hutan mereka. 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai masyarakat Adat Papua berhak mendapatkan keadilan, untuk mempertahankan hutan adat mereka dan

kehidupan tradisional mereka yang telah terancam oleh proyek perkebunan sawit. Mereka harus berjuang untuk memulihkan hak-hak yang dirampas oleh perusahaan, serta mereka juga berhak meminta perlindungan hukum. Hal ini diperkuat dengan gagasan yang disampaikan oleh Franky selaku perwakilan suku 40 awyu Saya ingin hidup aman dan damai. Kami berjuang tentang harkat dan martabat manusia, jati diri. Kami mau hidup di hutan aman, cari makan bebas, tidak mau konflik. Coba lihat di lapangan, apa yang

saya perjuangkan ini kebenaran ". 17 27 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Kompas.com upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa, meminta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat. 10. Analisis Media Nasional (Kompas.com) j.

Analisis Berita 10 Judul : Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di

Balik Seruan "All Eyes on Papua" Sumber : Kompas.com Tanggal : Selasa

a 04 Juni 2024 Ringkasan : Berita yang berjudul "Mengenal Suku Awyu

dan Moi, Sosok di Balik Seruan "All Eyes on Papua" tersebut berisi tentang. 16 20

Suku Awyu dan Moi, dua suku bangsa di Papua, menggelar aksi damai

di depan Gedung Mahkamah Agung (MA) untuk menuntut keadilan dan

membatalkan izin perusahaan sawit yang menggunduli hutan adat mereka. 11 Mereka

menyerukan agar MA memulihkan hak-hak masyarakat adat Papua yang dirampas. 11 23 Suku

Awyu tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Mappi dan Boven Digoel,

Provinsi Papua Selatan, dan memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Awyu. 11 Mereka

hidup mengembara dahulu, tetapi setelah dirangkul oleh penyebar agama

Katolik, mereka tinggal di pemukiman tetap. 11 23 25 Suku Moi, di sisi lain,

banyak mendiami Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Mereka terbagi

dalam tujuh subkelompok dan memiliki budaya menghias perahu tradisional. 11 Perahu

ini digunakan sebagai alat transportasi vital dan menjadi bagian dari kebudayaan mereka.

Mereka juga menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan. 11 23 Keduanya

menuntut agar pemerintah mengembalikan dan menyelamatkan hutan Papua dari

pembukaan perkebunan sawit. Poster 134 All Eyes on Papua 11 23 " merujuk

permintaan masyarakat adat Awyu dan Moi agar pemerintah mengembalikan dan menyelamatkan hutan Papua dari pembukaan perkebunan sawit.. Tabel 4. 10.

Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com Elemen Hasil Define Problem

(Pendefinisian Masalah) Perjuangan masyarakat adat Suku Awyu dan Moi Papua untuk mempertahankan hutan adat mereka (Masalah Ketidakadilan).

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Perjuangan Suku Awyu dan Moi untuk mengembalikan hutan mereka. Dalam hal ini suku Awyu dan Moi menjadi korban dari ketidakpastian hukum, serta kepentingan perusahaan.

Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Masyarakat Adat Papua berhak mendapatkan keadilan. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah)

Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita ini. 41 Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element

define problem, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada perjuangan masyarakat adat Suku Awyu dan Moi di Papua untuk

mempertahankan hutan adat mereka dari alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Hal ini tercermin melalui judul artikel "Mengenal Suku Awyu dan

Moi, Sosok di Balik Seruan "All Eyes on Papua" ". Serta mereka

ka menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hak-hak mereka dan lingkungan hidup yang telah diwariskan turun-temurun. 2.

Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada

pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah perjuangan Suku Awyu dan Moi untuk mengembalikan dan menjaga hutan

Papua dari pembukaan perkebunan sawit. 16 20 Mereka menggelar aksi damai di

depan Gedung Mahkamah Agung (MA) untuk menuntut keadilan dan membatalkan

izin perusahaan sawit yang mengkonversi hutan adat mereka menjadi perkebunan. 48 Suku

Awyu telah mengalami konversi hutan adat menjadi perkebunan sawit

terbesar di Indonesia melalui Proyek Tanah Merah, sedangkan Suku Moi

menghadapi ancaman penggundulan hutan adat oleh PT SAS untuk perkebunan sawit. 2 7 8 11

12 14 19 32 Kedua suku ini berjuang untuk melindungi hutan adat mereka

sebagai sumber pangan, obat-obatan, identitas sosial budaya, dan mata

pencaharian masyarakat. 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make

moral judgment, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai Suku Awyu dan Moi menuntut keadilan dan hak-hak masyarakat adat yang dirampas oleh pemerintah dan perusahaan. Mereka berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka atas hutan adat dan sumber daya alam, menunjukkan bahwa mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat adat dan lingkungan.. 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Kompas.com dalam berita ini tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan mengenai asal-usul masyarakat adat Awyu dan Moi di Papua.

4.2.1. Analisis Artikel Berita Jerat Papua 1. Analisis Media Lokal

(Jerat Papua) A. Analisis Berita 1 Judul : Suku Awyu Gugat PTPS

Provinsi Papua, Buntut di Keluarkan Ijin Lingkungan Hidup Perkebunan

Sawit Sumber : Jerat Papua Tanggal : Minggu 13 Maret 2023 Ringkasa

n: Berita ini berisi tentang gugatan masyarakat adat Awyu yang

menentang izin lingkungan hidup yang diberikan kepada perusahaan perkebunan

sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) oleh Dinas Penanaman Modan dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua. [3](#) [4](#) [6](#) [22](#) Masyarakat Awyu

menggugat PTSP karena diduga menutup informasi tentang izin-izin PT IAL

yang konsesinya akan mengubah wilayah adat mereka. [3](#) [4](#) [15](#) [18](#) Masyarakat Awyu

tidak mendapatkan informasi tentang rencana aktivitas perusahaan dan tidak

dilibatkan saat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). [3](#) [6](#) [22](#)

Perusahaan asal Malaysia All Asian Agro yang 42 mengendalikan PT

IAL diduga dikendalikan oleh perusahaan asal Malaysia All Asian Agro,

yang juga memiliki perkebunan sawit di Sabah di bawah bendera perusahaan East West One.

[3](#) [6](#) [26](#) PT IAL memperoleh lahan tersebut dari PT Energy Samudera

Kencana, anak perusahaan Menara Group yang sempat bakal menggarap Proyek

Tanah Merah di Boven Digoel. Tabel 4. 11. Analisis Artikel Berita 1

Jerat Papua Elemen Hasil Analisis Define Problem (Pendefinisian Masalah)

Masyarakat suku Awyu menggugat Dinas Penanaman Modan Perijinan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua (Masalah Hukum). Diagnose Causes

(Memperkirakan Penyebab Masalah) Pemerintah mengeluarkan Ijin Lingkungan

Hidup Bagi Perusahaan Perkebunan Sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya transparansi pihak perusahaan mengenai AMDAL. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah)

Membawa kasus ini ke jalur hukum untuk meminta pencabutan izin

kelayakan lingkungan hidup di PT IAL. Rincian Analisis 1. **49** Define Problem

Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Jerat Papua

mendefinisikan masalah pada masyarakat suku Awyu menggugat Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua. Hal tercermin melalui

judul artikel “Suku Awyu Gugat PTPS Provinsi Papua, Buntut di Keluarkan

Ijin Lingkungan Hidup Perkebunan Sawit”, serta hal ini didukung oleh

masyarakat perkataan masyarakat Awyu yang sudah mencari informasi mengenai

rencana perusahaan, serta upaya-upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat

Awyu untuk mendapatkan keadilan seperti menyampaikan permohonan informasi

publik untuk perizinan dari perusahaan yang akan berdiri. 2. Diagnose

Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian

masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah bagaimana

pemerintah dapat mengeluarkan izin kepada perusahaan sawit, hal ini

didukung oleh kutipan berita yang mengatakan izin kelayakan lingkungan

hidup dikeluarkan berdasarkan Amdal yang bermasalah, serta pemerintah juga

mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai wilayah adat. 3. Make

Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini

Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya membuka

komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, seperti melibatkan masyarakat

adat dalam proses penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. **4 15** Jerat Papua juga

memberikan gagasan pendukung seperti kutipan dari perwakilan suku Awyu

Franky Woro, “Kami sebagai pemilik wilayah adat tidak mendapatkan

informasi tentang rencana aktivitas perusahaan. **3 4 15 18** Kami juga tidak

dilibatkan saat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) ” 4. Treatmen

t Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam

pembingkaiian berita yang dilakukan oleh Jerat Papua upaya penyelesaian

yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa 43 membawa kasus

ini ke ranah hukum, untuk meminta pencabutan izin perusahaan. **3 6** Penyelesaian ini didasari karena masyarakat Adat Awyu tidak mendapatkan informasi mengenai rencana aktivitas perusahaan, serta izin kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan berdasarkan Amdal yang salah, “Upaya Franky menggugat Dinas Penanaman Modal dan PTSP ke Komisi Informasi Publik Provinsi Papua pun tak berhasil. Maka dalam gugatan ke PTUN Jayapura ini, Franky Woro memohon majelis hakim untuk memerintahkan pencabutan izin kelayakan lingkungan hidup PT IAL

” 2. Analisis Media Lokal (Jerat Papua) B. Analisis Berita 2 Judu

l : Perjuangan Masyarakat Adat Awyu, Peringatan Keras Perubahan Iklim

Dunia Sumber : Jerat Papua Tanggal : Selasa, 15 Maret 2023 Ringkasa

n: Masyarakat Adat Woro Suku Awyu dari Kabupaten Boven Digoel, Papua

Selatan, mengklaim hak tanah dan hutan adat mereka untuk seluruh

masyarakat adat Papua dan dunia. Masyarakat ini berjuang untuk menjaga

alam dan menghadapi perubahan iklim di dunia. **25 51** Mereka menggugat PT Indo

Asiana Lestari (PT IAL) dan mengajukan gugatan ke Pemerintah Provinsi

Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. **3 4 22** Masyarakat adat Woro

mendakwa bahwa pemerintah daerah tidak memberikan informasi tentang

izin-izin PT IAL yang konsesinya akan mencaplok wilayah adat mereka. **4** Pemerintah

harus segera mencabut Ijin Lingkungan Hidup serta Amdal dari PT IAL

sehingga masyarakat Awyu bisa tinggal, tidur aman dan nyaman. Masyarakat

ini juga mengajukan gugatan secara perdata Dinas Penanaman Modan

Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua yang telah

mengeluarkan Ijin Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Perkebunan Sawit PT

Indo Asiana Lestari (PT IAL). Tabel 4. 12. Analisis Artikel Berita 2

Jerat Papua Elemen Hasil Analisis Define Problem (Pendefinisian Masalah)

Masyarakat suku Awyu berusaha mempertahankan hutan adat mereka dari

ekspansi perusahaan perkebunan Sawit (Masalah pelanggaran hukum). Diagnose

Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Masyarakat Awyu berusaha

mempertahankan hutan adat merka untuk mencegah perubahan iklim. Make

Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya transparansi pihak

perusahaan mengenai ijin perusahaan. Treatment Recommendation (Penyelesaian

Masalah) Masyarakat membawa kasus ini ke jalur hukum untuk meminta pencabutan izin kelayakan lingkungan hidup di PT IAL (Membawa kasus ke pengadilan). Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada masyarakat suku Awyu berusaha mempertahankan hutan adat mereka dari ekspansi perusahaan perkebunan Sawit. Hal ini didukung dengan kalimat “bahwa perjuangan Masyarakat Adat Woro Suku Awyu dari Kabupaten Bovent Diegoel Papua Selatan dalam mempertahankan Hutan Adat mereka dari Ekspansi besar-besaran Perusahaan Perkebunan Sawit sebagai bagian dari menyikapi Fenomena alam di dunia dalam menghadapi 44 Perubahan Iklim. ” 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada definisi masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah masyarakat suku Awyu berusaha mempertahankan hutan adat mereka bukan hanya karena kepentingan mereka pribadi. 4 Namun, mereka juga berusaha untuk mencegah perubahan “iklim, hal ini dibuktikan dengan kutipan Sekar selaku kuasa hukum suku Awyu hari ini masyarakat Adat Awyu berdiri di sini Tidak hanya untuk dirinya, melainkan untuk dunia, karena hutan Papua milik marga Woro suku Awyu adalah hutan yang sangat penting bagi seluruh dunia. Hari ini ketika kita tidak menjaga alam maka perubahan iklim dan bencananya sedang mengancam kita ” 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya membuka komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, seperti melibatkan masyarakat adat dalam proses penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. 4 15 18 Gagasan ini diperkuat dengan kutipan Franky “Kami sebagai pemilik wilayah adat tidak mendapatkan informasi tentang rencana aktivitas perusahaan. 3 4 15 18 Kami juga tidak dilibatkan saat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) ” 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Jerat Papua upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa meminta pencabutan izin perusahaan. Penyelesaian ini didasari karena masyarakat Adat Awyu

tidak mendapatkan informasi mengenai rencana aktivitas perusahaan. 3.

Analisis Media Lokal (Jerat Papua) C. Analisis Berita 3 Judul :
Frengky Woro: Tanah Adalah Rekening Pribadi Bagi Kami Masyarakat Adat
Awyu Sumber : Jerat Papua Tanggal : Rabu, 16 Maret 2023 Ringkasan:
Kesimpulan dari berita ini adalah bahwa Masyarakat Adat Awyu
menginginkan peran aktif dari pemerintah dalam membantu mengawasi hutan
dan tanah adat mereka, yang merupakan sumber kehidupan bagi mereka.
Mereka juga menginginkan bantuan dari pemerintah untuk membantu mengawasi
hutan dan tanah adat mereka, yang merupakan sumber kehidupan bagi
mereka. Masyarakat ini juga menginginkan sosialisasi sebelum terbitnya ijin
lingkungan hidup yang diberikan PTSP provinsi Papua kepada perusahaan
perkebunan sawit, agar masyarakat adat dapat berpendapat secara bebas
tanpa ada intervensi perusahaan. Tabel 4. 13. Analisis Artikel Berita 3
Jerat Papua Elemen Hasil Analisis Define Problem (Pendefinisian Masalah)
Masyarakat suku Awyu menganggap tanah adat sebagai nomor rekening
pribadi. Diagnose Causes (Memperkirakan Perusahaan Perkebunan Sawit PT
Indo Asiana Lestari 45 Penyebab Masalah) (PT IAL), yang berdiri diatas
hutan adat dan tanah adat masyarakat adat Awyu. Make Moral Judgment
(Membuat Keputusan Moral) Masyarakat suku Awyu memiliki hak atas tanah
dan hutan adat mereka. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah)
Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Papua Selatan untuk mencabut izin
perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah suku Awyu
(Membawa kasus ke pengadilan). Rincian Analisis 1. Define Problem
Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Jerat Papua
mendefinisikan masalah pada masyarakat adat Awyu menganggap hutan adat
mereka sebagai nomor rekening pribadi yang selalu memberikan manfaat
bagi kehidupan mereka. Hal ini dicerminkan melalui judul artikel “Frengky
Woro: Tanah Adalah Rekening Pribadi Bagi Kami Masyarakat Adat Awyu.
” Masyarakat menganggap hutan menjadi rekening pribadi mereka, karena hutan
menjadi tempat masyarakat Awyu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
mereka, sehingga hutan memiliki peranan yang penting bagi masyarakat

suku Awyu. 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah keberadaan perusahaan perkebunan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) berdiri di atas hutan dan tanah adat masyarakat suku Awyu, tanpa meminta izin dan membahas Amdal dengan masyarakat Awyu. Hal ini didukung oleh kalimat “Selain itu dirinya memintah Pemerintah untuk segera mencabut ijin-ijin Perusahaan Perkebunan kelapa Sawit yang ada , sehingga alam yang menjadi sumber penghidupan mereka, jika tidak demikian dikawatirkan masyarakat adat akan hidup dimana.” 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral masyarakat adat Awyu memiliki hak atas hutan dan tanah adat mereka, karena hutan dan tanah adat tersebut menjadi sumber kehidupan mereka. Karena masyarakat adat Awyu melambangkan tanah adat sebagai nomor rekening pribadi yang memberikan kehidupan untuk mereka, dimana mereka sangat bergantung kepada hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini didukung melalui gagasan Franky ““kami mintah pemerintah bantu kami, karena kami tidak bisa kemana-mana sayangilah tanah dan hutan kami tanah adalah jati diri dan sumber kehidupan “tuturnya. 47 Frangky Woro mengkawatirkan nasib keluarga mereka dari marga Woro yang tidak memiliki Pendidikan, jika Hutan dan Tanah Adat mereka diramaps oleh Perusahaan Perkebuna Sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) untuk kepentingan Investasi. “ketika hutan mereka itu di gusur mereka akan kemana, yang mereka harapkan hanya alam “imbuhnya.” 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Jerat Papua upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa pemerintah Kabupaten dan Provinsi Papua Selatan harus mencabut izin bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di daerah suku Awyu, sehingga masyarakat suku Awyu tidak kehilangan peranan hutan yang sebelumnya. 46 4. Analisis Media Lokal (Jerat Papua) D. Analisis Berita 4 Judul : Masyarakat Adat Awyu Keberatan Jika Sidang Awal di

Lakukan Secara Elektronik Sumber : Jerat Papua Tanggal : Kamis, 13 April 2023 Ringkasan: Kesimpulan dari ini adalah bahwa Masyarakat Adat Awyu, khususnya Marga Woro, di Distrik Fofi Kabupaten Bovent Diegoel, Papua Selatan, menggugat Pemprov Papua dan PTSP Provinsi Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Gugatan ini mengenai ijin pengelolaan kawasan dan HGU yang diberikan kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Indo Asiana Lestari, yang akan beroperasi di wilayah adat mereka dan menghilangkan hutan adat. Gugatan ini sudah diterima dan akan di sidang pada tanggal 3 Mei 2023. Masyarakat Adat Awyu meminta bahwa sidang gugatan harus dilakukan secara konvensional, tetapi sesuai peraturan mahkamah Agung harus disesuaikan dengan cara Sidang Elektronik. Tabel 4. 14. Analisis Artikel Berita 4 Jerat Papua Elemen Hasil Analisis Define Problem (Pendefinisian Masalah) Masyarakat suku Awyu keberatan jika sidang perdana gugatan mereka di PTUN Jayapura dilakukan secara elektronik. Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Konten berita ini memperlihatkan jika kelangsungan hutan dan keselamatan warga di wilayah adat Marga Woro harus dipikirkan. Dalam hal ini masyarakat Awyu menjadi korban dari ketidakpastian pemerintah. Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) Suku Awyu tidak setuju dengan pemberian HGU pada PT Indo Asiana Lestari Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Menunggu sidang lanjutan. Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada masyarakat adat Awyu keberatan jika sidang gugatan mereka di PTUN Jayapura dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dicerminkan melalui judul artikel "Masyarakat Adat Awyu Keberatan Jika Sidang Awal di Lakukan Secara Elektronik." Serta ini karena pihak suku Awyu sudah melengkapi berkas-berkas gugatan, karena itu mereka berharap sidang dilaksanakan secara konvensional. 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah Marga Woro memikirkan mengenai kelangsungan hutan adat dan keselamatan

warga yang ada di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Hal ini karena masyarakat sangat bergantung dengan hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka, serta karena dikhawatirkan akan adanya kriminalisasi dan ancaman kekerasan kepada warga. “Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Indo Asiana Lestari, yang akan 47 beroperasi di wilayah adat mereka dan menghilangkan hutan adat. Terjadi 139 pro dan kontra, bahkan upaya kriminalisasi dan ancaman kekerasan terhadap warga yang melibatkan aparat kepolisian dan operator perusahaan.” 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral masyarakat adat Awyu keberatan dengan pengelolaan kawasan dan HGU yang diberikan kepada PT Indo Asiana Lestari, yang akan beroperasi di wilayah mereka. Hal ini diperkuat dengan gagasan oleh kuasa hukum masyarakat suku Awyu, Emanuel Gobay, bahwa mereka sudah melengkapi berkas gugatan, dan surat kuasa. Serta pro dan kontra, bahkan upaya kriminalisasi dan ancaman kekerasan terhadap masyarakat suku Awyu, yang melibatkan aparat kepolisian, dan operator perusahaan. 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam peminjaman berita yang dilakukan oleh Jerat Papua dalam berita ini memberikan penyelesaian untuk menunggu sidang lanjutan yang akan dilakukan pada 3 Mei 2023 mendatang, yang berisikan mengenai pemeriksaan dan kelengkapan berkas yang sudah diajukan. 2 5 . 5. Analisis Media Lokal (Jerat Papua) E. Analisis Berita 5 Judul : Perjuangan Lingkungan Hidup Dari Suku Awyu Ajukan Permohonan Intervensi Ke Ptun Jakarta Sumber : Jerat Papua Tanggal : Kamis, 11 Mei 2023 Ringkasan: Kesimpulan dari ini adalah tentang permohonan sebagai tergugat intervensi yang diterima oleh pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu terhadap dua perusahaan, PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, yang terlibat dalam gugatan korporasi terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2 5 7 Permohonan ini adalah bagian dari usaha perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka dari gugatan kedua perusahaan di atas. 2 3 5 6 7 8 12 21 30 33 Franky, salah satu pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu,

mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke PTUN Jayapura pada 13 Maret lalu, yang menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan PT Indo Asiana Lestari (PT IAL), yang juga berlokasi di Boven Digoel, Papua Selatan. 2 7 8 12 14 19 32 Franky menyebutkan bahwa kehidupan suku Awyu sangat tergantung pada tanah, hutan, sungai, rawa, dan hasil kekayaan alam lainnya, yang merupakan sumber mata pencaharian, pangan, dan obat-obatan serta identitas sosial budaya kami. Tabel 4.

15. Analisis Artikel Berita 5 Jerat Papua Elemen Hasil Analisis Define

Problem (Pendefinisian Masalah) Perjuangan suku Awyu untuk mengajukan permohonan Intervensi kepada pemerintah. Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Kelangsungan hak dan kepentingan masyarakat adat Awyu dari gugatan korporasi. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) Pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat adat. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Tidak adanya penyelesaian yang ditawarkan dalam berita ini. 48 Rincian Analisis 1. Define

Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada perjuangan masyarakat adat Awyu dalam mengajukan permohonan intervensi ke PTUN Jakarta. Hal dicerminkan melalui judul berita “Perjuangan Lingkungan Hidup Dari Suku Awyu Ajukan Permohonan Intervensi Ke Ptun Jakarta.” Ini dibuktikan dengan datangnya perwakilan masyarakat Awyu ke Jakarta untuk mendukung negara melindungi hutan mereka, serta meminta KLHK untuk membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat adat dalam pembuatan Amdal. 2 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah adalah kelangsungan mengenai hak serta kepentingan masyarakat adat Awyu dari gugatan korporasi PT Megakarya Jaya raya dan PT Kartika Cipta Pratama, terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini karena masyarakat menuntut keadilan bagi mereka, karena hutan adalah aset bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam

kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral bahwa pemerintah harus membuka informasi dan melibatkan masyarakat adat dalam membentuk pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan. Hal ini karena masyarakat adat adalah pemilik tanah tersebut, dan perusahaan serta pemerintah harus menghargai pemilik tanah. 2 7 8 Diperkuat dengan gagasan ““KLHK mesti membuka akses informasi hingga melibatkan masyarakat adat dalam menentukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, sesuai dengan pengetahuan lokal mereka. Tindakan pengabaian atas informasi dan partisipasi adalah bentuk pelanggaran hak,” kata Tigor Gemdita Hutapea, anggota Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua

” 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation, dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Jerat Papua tidak adanya upaya penyelesaian yang ditawarkan dalam berita tersebut, karena berita tersebut hanya membahas mengenai bagaimana perjuangan suku Awyu mengajukan intervensi. 6. Analisis Media Lokal (Jerat Papua) F. Analisis Berita 6 Judul : Saksi Ungkap Sejumlah Fakta Sengketa Lahan Suku Awyu & PT IAL di Bovernt Diegol Sumber : Jerat Papua Tanggal : Jum’at, 28 Juli 2023 Ringkasan: Kesimpulan dari berita ini adalah bahwa sidang gugatan antara marga Woro suku Awyu dan Pemerintah Provinsi Papua terhadap izin operasional PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) dalam bidang perkebunan kelapa sawit di Distrik Fofi Kabupaten Bovernt Diegol terus berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Dalam sidang lanjutan, kuasa hukum penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan tentang adanya pemaksaan dan intimidasi oleh pihak perusahaan 49 menggunakan jasa lembaga-lembaga masyarakat adat untuk meminta dukungan dalam upaya memintah wilayah mereka sebagai area perkebunan kelapa sawit PT IAL. Saksi-saksi tersebut juga mengungkapkan bahwa PT IAL tidak pernah meminta izin atau berpacita kepada mereka sebagai pemilik ulayat bersama marga Woro dan suku Awyu dalam melakukan aktivitas survey di area konsesinya di atas tanah adat Awyu. Sidang ini berfokus pada pembuktian dengan memasukan sejumlah alat bukti tambahan ke majelis hakim PTUN Jayapura, termasuk

keterangan saksi dan bukti tambahan lainnya. Tabel 4. 16. Analisis Artikel Berita 6 Jerat Papua Elemen Hasil Analisis Define Problem (Pendefinisian Masalah) Persidangan antara marga Woro dan Pemerintah Provinsi Papua terhadap izin operasional PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura (Masalah hukum). Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Perusahaan tidak pernah meminta izin kepada suku Awyu selaku pemilik tanah. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) Pemerintah dan perusahaan harus lebih transparan dan berkomunikasi dengan masyarakat adat Awyu. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita ini. Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada sidang gugatan antara marga Woro suku Awyu dan Pemerintah Provinsi Papua terhadap izin operasional PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Dalam sidang lanjutan, kuasa hukum penggugat menghadirkan dua orang saksi untuk bersaksi di persidangan. Saksi pertama, Kasmilus Abe, mengungkapkan bahwa PT IAL tidak pernah meminta izin atau berpamitan kepada mereka sebagai pemilik ulayat bersama marga Woro dan suku Awyu dalam melakukan aktivitas survey di area konsesinya di atas tanah adat Awyu. Saksi kedua, Arief Ramadhan, mengungkapkan bahwa PT IAL tidak pernah meminta izin dan melakukan pemaksaan serta intimidasi terhadap masyarakat adat Awyu untuk melepaskan wilayah mereka sebagai area perkebunan kelapa sawit PT IAL. Kuasa hukum penggugat menghadirkan alat bukti tambahan untuk membantu memperkuat klaim penggugat dan mengajukan gugatan terkait izin operasional PT IAL di wilayah adat Awyu. “Pada lanjutan Sidang Gugatan antara marga Woro suku Awyu dan Pemerintah Provinsi Papua, terhadap izin beroperasinya PT Indo Asiana Lestari atau PT IAL. Yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Distrik Fofi Kabupaten Bovent Diegol terus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.” 2. Diagnose Causes Dilihat dar

i elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah perusahaan yang sama sekali tidak pernah meminta izin kepada masyarakat Awyu selaku pemilik tanah ulayat. Namun, tiba-tiba sudah ada tim survey yang didatangkan oleh perusahaan ke hutan adat mereka. Hal ini didukung oleh gagasan Kasmilus Abe “Tidak sampai disitu saksi juga mengungkapkan bahwa PT IAL tidak pernah memintah ijin atau berpamita kepada mereka sebagai pemilik ulayat bersama marga 50 woro dan suku awyu dalam melakukan aktifitas survey di area konsesinya di atas tanah adat Awyu.”

3. Make Moral Judgment
Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral bahwa pemerintah dan perusahaan PT Indo Asiana Lestari (IAL) harus lebih transparan dan berkomunikasi dengan masyarakat adat Awyu sebelum melakukan kegiatan survey dan pengembangan di area konsesi perkebunan sawit. Mereka harus memenuhi hak masyarakat adat untuk mengetahui dan menyetujui kegiatan yang akan dilakukan di wilayah mereka. Keputusan ini juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberlangsungan lingkungan di Papua “kami tidak pernah di beritahu , tiba-tiba ada tim sudah survey di hutan adat kami.”

4. Treatment Recommendation
Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Jerat Papua dalam berita ini tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan perkembangan sidang gugatan antara marga suku Awyu dan Pemerintah Provinsi Papua.

7. Analisis Media Lokal (Jerat Papua) G.
Analisis Berita 7 Judul : Peringatan HIMAS 09 Agustus 2023 “Orang Muda Papua Bersatu Menjaga dan Melindungi Hak-hak Masyarakat Adat, Kelestarian Hutan Hujan Untuk Keadilan Antar Generasi dan Keadaan Iklim Sumber : Jerat Papua Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2023 Ringkasan: Kesimpulan berita ini adalah bahwa hutan hujan di Tanah Papua, Indonesia, menghadapi ancaman serius dari perubahan fungsi lahan untuk perkebunan skala besar, pertambangan, dan logging ilegal, yang dapat menyebabkan deforestasi dan kerusakan ekologis. Masyarakat adat Papua sangat terlibat

dengan hutan hujan dan memiliki hak-hak tradisional yang harus dihormati dan dilindungi. Mereka telah melakukan penolakan terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk ke wilayah adat mereka dan telah mengajukan gugatan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Gerakan orang muda Papua telah aktif dalam mempertahankan hutan hujan dan hak-hak masyarakat adat melalui organisasi-organisasi yang berbeda, seperti Aliansi Masyarakat Sagu, Aliansi Mahasiswa Rakyat Papua Selatan, dan Koalisi Selamatkan Lembah Grime Nawa. Kowaki Tanah Papua, sebuah organisasi yang mendukung hak-hak masyarakat adat, menyerukan kepada orang muda Papua untuk memperluas konsolidasi dan membangun jaringan untuk mempertahankan wilayah adat mereka, serta meminta komunitas internasional untuk berjarang dan bekerjasama dalam upaya penyelamatan hutan hujan Papua yang sangat penting untuk keseimbangan ekosistem global dan krisis iklim. Tabel 4.

17. Analisis Artikel Berita 7 Jerat Papua 51 Elemen Hasil Analisis

Define Problem (Pendefinisian Masalah) Pentingnya melindungi hutan hujan Papua dan hak-hak masyarakat adat. Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Hutan Papua menghadapi ancaman serius. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya menjaga kelestarian hutan Papua. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Penolakan oleh masyarakat adat Papua terhadap perkebunan skala besar dan pertambangan di wilayah mereka. Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada pentingnya melindungi hutan hujan Papua dan hak-hak masyarakat adat. Karena hutan hujan di Papua dianggap sebagai paru-paru dunia, karena memiliki peran menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, serta masyarakat adat juga sangat bergantung dengan hutan adat mereka. 2. Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah hutan hujan Papua menghadapi ancaman serius dimana akan dialih fungsikan untuk perkebunan skala bersar, dan akan menyebabkan deforestasi, sehingga akan berkontribusi dalam krisis iklim. 3. Make Moral Judgment Dilihat

dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral bahwa pentingnya menjaga kelestarian hutan Papua, karena penting bagi ekosistem global dan mitigasi perubahan iklim. Serta merupakan tempat tinggal bagi masyarakat adat yang masih hidup secara tradisional dan menggantungkan hidup dengan hutan tersebut, hutan hujan Papua memang milik masyarakat adat. Hal ini diperkuat dengan gagasan “hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat , dan bukan lagi hutan negara.” 4. Treatment Recommendation Jerat Papua dalam menyelesaikan yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa penolakan oleh masyarakat adat Papua terhadap perkebunan skala besar dan pertambangan di wilayah adat mereka. Mereka menolak karena kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut dapat berdampak pada hilangnya hutan, habitat, dan spesies, beserta sumber kehidupan masyarakat adat. Mereka juga menolak karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak membawa keuntungan bagi mereka dan tidak mengubah sedikit ekonomi mereka. Mereka melakukan penolakan dengan menggunakan pemuda memperluas jaringan dan mengajak komunitas internasional untuk bekerjasama menyelamatkan hutan. 8. Analisis Media Lokal (Jerat Papua) H. Analisis Berita 8 Judul : “PTUN Jakarta Tolak Gugatan Perusahaan Sawit, Perjuangan Suku Awyu Menang di Harapkan Masyarakat Adat Kepada Pemerintah” Sumber : Jerat Papua Tanggal Kamis, 09 Agustus 2023 52 : Ringkasan: Kesimpulan dari berita ini adalah tentang perlawanan masyarakat adat Awyu di Papua terhadap upaya perusahaan sawit untuk menguasai hutan adat mereka. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan berhasil memenangkan kasusnya, yang menyatakan bahwa 65.415 hektar hutan hujan primer tidak boleh dihancurkan dan hanya 8.828 hektar lahan hutan milik masyarakat adat yang sudah dibuka boleh digunakan. Masyarakat Awyu berharap agar perusahaan tidak lagi mengganggu hutan dan tanah adat mereka, dan mereka juga menginginkan pemerintah segera mengakui hak atas tanah adat mereka.

3 26 29 39 Perjuangan ini merupakan bagian dari upaya masyarakat adat Papua dalam melindungi hutan adat mereka dari eksploitasi oleh perusahaan

sawit, yang menjadi permasalahan serius di Papua seperti yang diungkapkan dalam laporan Greenpeace Internasional 'Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua'. Tabel 4. 18. Analisis Artikel Berita 8 Jerat Papua Elemen Hasil Analisis Define Problem (Pendefinisian Masalah) PTUN Jakarta tolak gugatan dua Perusahaan sawit . Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Perjuangan masyarakat Adat Awyu untuk mempertahankan hutan mereka. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya mendukung perjuangan masyarakat Awyu Papua. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Penyelesaian yang ditawarkan adalah upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak yang peduli lingkungan (Melakukan musyawarah). Rincian Analisis 1. Define Problem Dalam aspek pendefinisian masalah, dalam berita ini, Jerat Papua menggambarkan masalah pada keputusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan dari PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, yang mengakibatkan penyelamatan 65.415 hektar hutan adat Papua. Keputusan ini melarang perusahaan melakukan deforestasi di area tersebut, sebagaimana tercermin dalam judul berita. 2. Diagnose Causes Dalam konteks mendiagnosis penyebab, yang mengacu pada pendefinisian masalah, Jerat Papua mengidentifikasi bahwa akar masalahnya adalah upaya masyarakat adat Awyu di Papua untuk melindungi hutan adat mereka dari pengambilalihan oleh perusahaan kelapa sawit. 14 40 44 Mereka menghadapi gugatan dari dua perusahaan sawit, PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, yang mencoba untuk menguasai hutan adat mereka. Masyarakat Awyu memperjuangkan hak mereka atas tanah adat dan hutan adat melalui proses hukum, dengan bantuan organisasi-organisasi lingkungan dan hak asasi manusia. Mereka berharap agar pemerintah mengakui dan melindungi hak mereka atas hutan adat, serta menghentikan perampasan tanah adat oleh perusahaan sawit yang tidak berprinsip etika dan berkelanjutan. 3. Make Moral Judgment Dari sudut pandang membuat penilaian moral, Jerat Papua menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah dan hak-hak mereka atas tanah adat sangatlah krusial dan seharusnya

mendapat dukungan. Mereka harus bertahan untuk melindungi hutan adat mereka dan mengelolanya sendiri, demi keberlangsungan hidup dan masa depan mereka. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan dua perusahaan kelapa sawit dan mengakui kemenangan Masyarakat Adat Awyu dalam perjuangan mereka untuk tanah adat di Boven Digoel Papua Selatan, menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat adat bisa berhasil jika mereka bersatu dan berjuang dengan tekun.

4. Treatment Recommendation

Dalam konteks rekomendasi penanganan, dalam penyampaian berita oleh Jerat Papua, solusi yang diusulkan disorot sebagai isu hukum yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan kelompok lingkungan untuk mengamankan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat terkait hutan adat mereka.

9. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

I. Analisis Berita 9

Judul : “Menunggu Putusan PTUN Jayapura atas Gugatan Masyarakat Adat Awyu”
Sumber : Jerat Papua
Tanggal : Senin, 23 Oktober 2023
Ringkasan: Menurut laporan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura akan mengambil keputusan akhir terkait gugatan yang diajukan oleh Masyarakat Adat Awyu dari Distrik Fofi dan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, terhadap Pemerintah Provinsi Papua, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada tanggal 2 November 2023. Gugatan ini dipicu oleh keputusan Kepala PTSP Provinsi Papua Nomor 82 tahun 2020.

Tabel 4. 19. Analisis Artikel Berita 9 Jerat Papua

Elemen Hasil Analisis Define Problem (Pendefinisian Masalah)

Masyarakat Awyu menunggu putusan PTUN Jayapura atas gugatan yang mereka ajukan.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Masyarakat khawatir kehilangan hak tanah adat mereka.

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Pentingnya mendukung perjuangan masyarakat Awyu Papua.

Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah)

Meminta ketegasan payung hukum yang jelas untuk melindungi kasus-kasus serupa.

Rincian Analisis 1. Define Problem

Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada PTUN Jakarta yang menolak gugatan dari dua perusahawan sawit, PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta

Pratama, dimana putusan ini menyelamatkan 65.415 hektare hutan adat papua, dan perusahaan tidak boleh melakukan deforestasi dalam area tersebut. Hal ini tercermin melalui judul artikel “Menunggu putusan PTUN Jayapura atas Gugatan Masyarakat Adat Awyu” (Jerat Papua 2023) 2 . Diagnose Causes Sumber masalah menurut Jerat Papua adalah Masyarakat Awyu yang memperjuangkan hak mereka atas tanah adat dan hutan adat melalui proses hukum, dengan bantuan organisasi- 54 organisasi lingkungan dan hak asasi manusia. Mereka berharap agar pemerintah mengakui dan melindungi hak mereka atas hutan adat, serta menghentikan perampasan tanah adat oleh perusahaan sawit yang tidak berprinsip etika dan berkelanjutan. 28

“Rencana perkebunan kelapa sawit ini telah ditentang Masyarakat yang khawatir kehilangan hak tanah adat yang telah dijaga dan Kelola turun temurun sebagai sumber kehidupan hak tanah adat yang telah dijaga dan Kelola turun temurun sebagai sumber kehidupan. Tindakan sewenang pemerintah yang tetap memaksa pemberitaan izin akhirnya di gugat” (Jerat Papua 2023) 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral bahwa perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah dan hak-hak mereka atas tanah adatnya sangat penting dan harus didukung. 29 Mereka harus berjuang keras untuk melindungi hutan adat mereka dan mengelola hak, demi penghidupan sehari-hari dan masa depan mereka.

Hal ini didukung oleh kalimat “Gugatan ini mendapat disusun. Gerakan Solidaritas Untuk selamatkan hak adat papua ditandatangani 73 lembaga dan 94 individu.

28 Dukungan awal telah diserahkan ke Majelis Hakim, dukungan akan bertambah hingga menjelang putusan” (Jerat Papua 2023) 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Jerat Papua upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak yang peduli lingkungan untuk memperoleh pengakuan dan peduli kepada hak-hak masyarakat adat atas hutan adat mereka. 10. Analisis Media Lokal (Jerat Papua) J. Analisis Berita 10 Judul : “Putusan PTUN Jayapura Jadi Kemundurkan Pelindungan Masyarakat

Adat Awyu dan Lingkungan Hidup Musyawarah Besar Masyarakat Adat Suku Awyu Hasilkan 7 Kesepakatan Untuk Penyelamatan Manusia, Tanah dan Hutan” Sumber : Jerat Papua Tanggal : Senin, 23 Oktober 2023 Ringkasan : Dalam berita ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan mengenai lingkungan dan perubahan iklim yang diajukan oleh Marga Woro, seorang aktivis lingkungan dari suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, terhadap Pemerintah Provinsi Papua terkait izin kelayakan lingkungan untuk PT Indo Asiana Lestari. Gugatan ini menuntut penghentian kegiatan perkebunan kelapa sawit, yang dianggap dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Marga Woro dan para pengacaranya menyesalkan bahwa hakim tidak memahami kasus ini sebagai gugatan lingkungan dan perubahan iklim serta tidak mempertimbangkan partisipasi signifikan dari masyarakat adat dalam penerbitan izin. 10 21 24 52 Mereka juga menyesalkan bahwa hakim tidak mengakui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Pedoman Penyelesaian Perkara Lingkungan. 55 Tabel

4. 20. Analisis Artikel Berita 10 Jerat Papua Elemen Hasil Analisis

Define Problem (Pendefinisian Masalah) Putusan PTUN Jayapura menjadi kabar buruk untuk masyarakat Awyu. Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang ditolak oleh PTUN Jayapura. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) Pentingnya mempertimbangkan keputusan hukum. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Upaya pengajuan banding (Membawa ke pengadilan). Rincian Analisis

1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada PTUN Jayapura tidak menerima gugatan lingkungan hidup serta perubahan iklim yang diajukan oleh perwakilan suku Awyu. Sementara jika perusahaan tersebut berdiri akan memberikan dampak perubahan iklim yang signifikan. 10 Hal ini dicerminkan dalam kalimat “Putusan hakim yang diunggah hari ini tersebut menjadi kabar buruk bagi masyarakat adat suku awyu yang sedang berjuang mempertahankan hutan adat mereka dari perusahaan sawit” (Jerat Papua 2023) 2.

Diagnose Causes Dilihat dari elemen diagnose causes, maka sumber

masalah menurut Jerat Papua adalah kasus gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari adalah Ketidak konsistenan dalam keputusan yang tidak memperhitungkan secara substansial analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan yang tidak melibatkan partisipasi yang signifikan dari komunitas pribumi, dinyatakan oleh frase ini. “Pengadilan tata usaha negara (PTUN) Jayapura yang menolak gugatan lingkungan terhadap pemerintah provinsi papua 159 atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari”

3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan keputusan moral bahwa pentingnya mempertimbangkan keputusan hukum, karena keputusan yang diambil PTUN memberikan dampak besar. **10 13** Serta Keputusan hakim dinilai janggal, dan hal ini didukung oleh gagasan “Kami kecewa dengan putusan hakim dan akan memperjuangkan kasus ini sampai memang demi tegaknya hak masyarakat adat, selamanya hutan Papua dari kerusakan yang masig, dan menahan hak masyarakat adat, selamatnya hutan Papua dari rusak 4. Treatment Recommendation

Dilihat dari elemen treatment recommendation, penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa melakukan upaya pengajuan banding, dimana suku Awyu disarankan untuk mengajukan banding dari putusan PTUN Jayapura, hal ini menjadi Langkah penting untuk mempertahankan hutan adat suku Awyu. 56 11. Analisis Media Lokal (Jerat Papua) K. Analisis Berita 11 Judul : “Musyawarah Besar Masyarakat Adat Suku Awyu Hasilkan 7 Kesepakatan Untuk Penyelamatan Manusia, Tanah dan Hutan” Sumber : Jerat Papua Tanggal : Senin, 11 Desember 2023 Ringkasan:

Kesimpulan berita ini adalah tentang Kesimpulan dari berita berikut, Komunitas suku Awyu, yang berada di distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, berhasil mencapai tujuh kesepakatan bersama melalui perundingan yang luas. Kesepakatan-kesepakatan ini bertujuan untuk melindungi orang, tanah, dan hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat adat dari ancaman investasi. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat suku

Awyu berkomitmen untuk mempertahankan wilayah adat mereka dan menghadapi ancaman investasi yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Mereka juga berkomitmen untuk menjaga hutan sebagai sumber kehidupan mereka dan mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Kesepakatan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat adat suku Awyu memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan kebudayaan mereka, serta kesadaran akan ancaman yang mereka hadapi dan kebutuhan untuk bersatu dalam melawan ancaman tersebut.

Tabel 4. 21. Analisis Artikel Berita 11 Jerat Papua Elemen Hasil Analisis Define Problem (Pendefinisian Masalah) Musyawarah besar suku Awyu menghasilkan 7 kesepakatan. Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) Pembentukan sejumlah tokoh penting suku Awyu. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) Masyarakat Awyu berhak atas kekayaan alam yang ada di tanah mereka. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Tidak adanya penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita terkait.

Rincian Analisis 1. Define Problem Dilihat dari element define problem, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada Makna utama dari berita berikut, Selama perundingan yang melibatkan suku Awyu di distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, tercapai tujuh kesepakatan bersama yang berkomitmen untuk melindungi orang, tanah, dan hutan yang merupakan sumber kehidupan suku Awyu dari ancaman investasi berkomitmen untuk mempertahankan wilayah adat mereka melalui berbagai cara, termasuk pembentukan struktur kepemimpinan dan kesepakatan bersama. Mereka berjuang untuk melindungi hutan adat mereka yang terancam oleh investasi dan untuk mempertahankan budaya dan tradisi mereka yang terkait dengan alam. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga hutan sebagai sumber kehidupan dan budaya mereka, serta meminta pemerintah untuk memahami dan menghormati hak-hak mereka sebagai masyarakat adat. Hal ini tercermin dari judul “Musyawarah Besar Masyarakat Adat Suku Awyu Hasilkan 7 kesepakatan untuk penyelamatan Manusia Tanah dan Hutan” (Jerat Papua) 2 .

Diagnose Causes 57 Dari perspektif mendiagnosis penyebab, yang mencakup pendefinisian masalah, Jerat Papua menyatakan bahwa akar

masalahnya adalah pembentukan tokoh-tokoh kunci dalam komunitas Paralegal Gerakan Cinta Tanah Adat Awyu Bersatu yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan wilayah adat suku Awyu. 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan keputusan moral bahwa masyarakat Awyu berhak atas kekayaan alam yang ada di tanah mereka, karena mereka masih bergantung terhadap hutan mereka, dan mereka juga memiliki kedekatan dengan hutan mereka.

Hal ini tercermin melalui “Seluruh Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu, mempunyai hasil kekayaan alam dan hidup ketergantungan pada alam tempat mereka tinggal sejak nenek moyang leluhur dengan menjaga hutan dan hutan menjaga saya” (Jerat Papua 2023) 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation, dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Jerat Papua tidak adanya penyelesaian yang diberikan dalam berita terkait, berita tersebut hanya menjelaskan mengenai musyawarah yang dilakukan suku Awyu dan apa yang dihasilkan dari musyawarah tersebut.

12. Analisis Media Lokal (Jerat Papua) L. Analisis Berita 12 Judul :

“Suku Awyu: Kami Akan Mempertahankan Tanah dan Hutan Sebagai Budaya dan Kehidupan Kami” Sumber : Jerat Papua Tanggal : Senin, 11 Desember 2023 Ringkasan: Berita ini mencatat bahwa Masyarakat Adat Marga Woro Suku Awyu di Papua menentang keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang menolak gugatan mereka terhadap PT Indo Asiana Lestari, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengambil tanah adat mereka. Mereka menentang keputusan ini karena percaya bahwa perusahaan telah menggunakan metode yang tidak manusiawi dalam mengklaim wilayah mereka, yang dianggap sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka juga menolak perjanjian 80/20 yang diberlakukan secara sepihak oleh perusahaan, di mana 80 persen pendapatan perkebunan diklaim oleh perusahaan dan hanya 20 persen yang diberikan kepada masyarakat adat.

Tabel 4. 22. Analisis Artikel Berita 12 Jerat Papua Elemen Hasil

Analisis Define Problem (Pendefinisian Masalah) Masyarakat suku Awyu terus mempertahankan hutan Adat mereka. Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab

Masalah) Perusahaan kelapa sawit hadir tidak manusiawi. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) Masyarakat adat tidak diberikan kesempatan. Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) Mempertahankan hasil musyawarah yang telah dilakukan suku Awyu. Rincian Analisis 58 1. Define Problem Di Papua, Indonesia, komunitas pribumi suku Awyu terus mempertahankan tanah adat dan hutan mereka dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Indo Asiana Lestari, yang telah memaksa mereka meninggalkan wilayah mereka. Ini merupakan masalah yang didefinisikan oleh Jerat Papua, berdasarkan fitur definisi masalah dalam artikel berita ini. Mereka tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang menolak gugatan mereka dan menuntut agar pemerintah segera menghentikan operasi pengusiran hutan mereka. Mereka mengharapkan sikap yang lebih tegas dari pemerintah dalam mempertahankan hak-hak pribumi dan mengakhiri tindakan yang membahayakan mereka. Hal ini tercermin dalam judul berita tersebut. 2. Diagnose Causes Menurut Jerat Papua, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah adat suku Awyu merupakan akar masalah. Ini didasarkan pada elemen mendiagnosis penyebab, yang mengacu pada definisi masalah. Perusahaan memaksa penduduk asli untuk mengakui perjanjian 80/20 yang dibuat secara sepihak, yang mengalokasikan 80% pendapatan perusahaan kepada masyarakat Adat dan 20% sisanya untuk perusahaan. 3. Make Moral Judgment Dilihat dari elemen make moral judgment, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan keputusan moral bahwa masyarakat adat tidak diberikan kesempatan, karena perusahaan sudah menentukan kesepakatan secara sepihak. 38 Serta hal ini diperkuat dengan gagasan yang diberikan oleh Kasimilus Awe selaku ketua Tim Paralegal suku Awyu “kami tidak diberikan kesempatan, kami semua duduk diam dan perusahaan dia menyampaikan kepada kami tentang rencana kegiatan perusahaan serta luas lokasi yang dia butuhkan, seakan itu mereka sudah atur sendiri” (Jerat Papua 2023) 4. Treatment Recommendation Dilihat dari elemen treatment recommendation , dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Jerat Papua upaya penyelesaian

yang diusulkan mempertahankan hasil keputusan yang telah dilakukan oleh masyarakat Awyu pada November 2023, yaitu musyawarah ini menghasilkan 7 poin, salah satu poinnya “Seluruh Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu, mempunyai Hasil kekayaan alam dan hidup ketergantungan pada alam Tempat mereka tinggal sejak nenek moyang leluhur dengan menjaga hutan dan hutan menjaga saya” (Jaya Papua 2023) 4.3. Perbandingan Analisis Framing Setelah melakukan analisis artikel di Kompas.id dan Jerat Papua, perbandingan pengembangan akan dibahas dengan menggunakan formula framing Entman. Robert Entman adalah seorang ahli komunikasi politik yang berfokus pada cara media mempersenrasikan informasi dan mengatur informasi dengan cara tertentu untuk mempengaruhi persepsi, pemahaman, dan penilaian khalayak. Entman mengatakan bahwa framing memainkan peran penting dalam mempengaruhi 59 cara orang memahami suatu masalah atau peristiwa. Ini dilakukan dengan memberikan konteks, menyoroti beberapa elemen, mengabaikan yang lain, dan menghubungkannya dengan kerangka pikiran yang sudah ada. Dengan demikian, framing dapat mempengaruhi perhatian dan interpretasi audiens. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan bagaimana individu memahami dunia dengan menggunakan strategi framing. Dalam konteks studi ini, framing difokuskan pada isu lingkungan dan persepsi terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, dengan memahami konsep framing Entman, kita dapat membantu masyarakat menjadi lebih kritis terhadap cara media mempengaruhi pandangan dan penilaian kita tentang kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan teknik framing, media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pendapat publik dan cara orang memahami realitas. Tabel 4.3. 1. Perbandingan Pembingkai Konflik Tanah Adat Suku Awyu Papua Pada Media Online (Analisis Framing Robert N. Entman pada Kompas.com dan Jerat Papua Periode Maret 2023 – Juni 2024) Perangkat Framing Kompas.com Jerat Papua Define Problem Kompas.com membingkai isu Konflik tanah adat Awyu sebagai masalah pelanggaran HAM agraria. Kompas.com juga fokus kepada bagaimana perjuangan masyarakat Awyu dalam mempertahankan hak mereka. Jerat Papua membingkai isu konflik tanah

adat Awyu sebagai masalah pelanggaran HAM agraria. Jerat Papua juga fokus kepada bagaimana perkembangan kasus hukum yang sedang dijalani oleh masyarakat adat Awyu. Diagnose Causes Kompas.com cenderung melihat penyebab masalah karena banyak terjadi pelanggaran HAM mengenai agraria yang terjadi di wilayah Papua. Suku Awyu dalam hal ini menjadi korban, karena menghadapi ancaman kerusakan lingkungan akibat korporasi. Jerat Papua cenderung melihat fenomena ini disebabkan karena pemerintah daerah dan perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat Awyu. Suku Awyu dalam hal ini menjadi korban, karena kepentingan perusahaan dan ketidaktegasan pemerintah. Make Moral Judgment Kompas.com menekankan bahwa pentingnya melindungi hutan adat sebagai identitas suku Awyu. Jerat Papua menekankan pentingnya memberikan transparansi perizinan kepada masyarakat, karena masyarakat Awyu memiliki hak atas tanah mereka. Treatment Recommendation Kompas.com cenderung menyelesaikan masalah dengan mengambil jalur hukum. Jerat Papua cenderung menyelesaikan masalah dengan mengambil jalur hukum, dan melakukan musyawarah. Sumber: Olahan Peneliti Tabel 4.3.1 mengilustrasikan bagaimana interpretasi dan definisi yang beragam terhadap peristiwa yang sama dapat muncul dalam konflik hutan antara Kompas.com dan Jerat Papua mengenai wilayah adat suku Awyu. Tabel ini menunjukkan kesamaan antara definisi masalah 60 Kompas.com dan satu ini, yang menggambarkan konflik tanah adat Awyu sebagai masalah pelanggaran hak-hak agraria. Hal yang sama berlaku untuk Jerat Papua, namun Kompas.com lebih fokus pada perjuangan yang dihadapi oleh suku Awyu dalam mempertahankan hak-hak mereka, sementara kedua publikasi ini memiliki tema yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari berita yang diambil untuk diteliti, yang membahas mengenai konflik tanah adat tersebut sebagai pelanggaran HAM, dimana fokus utama Kompas.com adalah membahas bagaimana perjuangan yang dilakukan masyarakat Awyu dalam mempertahankan tanah adat mereka, dengan cara membawa ke jalur hukum, dan meminta bantuan kepada Komnas HAM. Sementara Jerat Papua fokus pada bagaimana perkembangan hukum yang sedang dijalankan oleh masyarakat Awyu, seperti

bagaimana putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Jayapura, dimana hal ini tercerminkan melalui judul artikel di setiap media. Dalam elemen mendiagnosis penyebab, terdapat perbedaan dalam framing. Menurut Kompas.com, akar masalahnya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan masalah pertanian yang terjadi di wilayah Papua. Suku Awyu adalah korban dalam hal ini karena mereka berisiko mengalami kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan- perusahaan. Menurut Kompas.com, dalam kasus di mana sebagian besar tanah mereka telah diambil, langkah terbaik adalah mengajukan gugatan dan meminta dukungan dari Komnas HAM, sebuah organisasi independen yang memiliki kedudukan sejajar dengan organisasi pemerintah. Sementara Jerat Papua cenderung melihat kasus ini disebabkan karena pemerintah daerah dan perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat Awyu. Suku Awyu dalam hal ini menjadi korban, karena kepentingan perusahaan dan ketidak tegasan pemerintah. Hal ini dapat dilihat melalui bagaimana narasi dalam berita tersebut dimana pemerintah daerah dan perusahaan tidak mengikut sertakan masyarakat dalam perumusan AMDAL, perusahaan juga memberikan pembagian hasil yang sangat merugikan yaitu 80/20, dimana 80% hasil dari pengelolaan hutan adat suku Awyu yang dijadikan perkebunan sawit, dan masyarakat adat hanya diberikan 20% dari hasil tanah mereka, serta kesepakatan mengenai pembagian hasil juga tidak mengikut sertakan masyarakat Awyu di dalamnya. Pada elemen Make Moral Judgment Kompas.com menekankan isu ini terkait dengan pentingnya melindungi hutan adat yang menjadi identitas masyarakat Awyu. Karena hutan adat milik suku Awyu merupakan tempat bagi mereka untuk menggantungkan hidup, serta masyarakat Papua juga dikenal sangat dekat dengan hutan, dan hutan dianggap sebagai Ibu untuk mereka (Opu, 2021). Suku Awyu memiliki hak atas tanah adat mereka, sehingga Jerat Papua menekankan pentingnya transparansi dalam pemberian izin kepada masyarakat. Media di Jerat Papua umumnya menggunakan pernyataan dari pihak yang mendukung Komunitas Awyu untuk memperkuat liputannya, oleh karena itu Kompas.com terus memuat banyak kutipan dari Komnas HAM. Keduanya

meyakini bahwa situasi ini melanggar hak asasi manusia dan seharusnya ditangani melalui sistem peradilan. Dalam hal ini berita ini juga mengandung nilai berita Impact karena kasus Suku Awyu menunjukkan konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan perusahaan sawit yang mengincar hutan adat. Konflik ini mencerminkan perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti masyarakat adat yang ingin melindungi hutan adat dan pemerintah yang ingin meningkatkan pendapatan dengan mengizinkan perkebunan sawit. Pada elemen Treatment Recommendation Kompas.com cenderung menyelesaikan masalah dengan mengambil jalur hukum, yaitu mengajukan intervensi atau campur tangan dari 61 pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat Awyu Papua dan Perusahaan, namun, sebagian berita Kompas.com tidak memberikan treatment recommendation. Sementara Jerat Papua menyarankan agar masyarakat adat harus mempertahankan hutan mereka dengan apapun caranya, seperti melakukan musyawarah hingga membawa kasus ini ke jalur hukum. Jadi media Kompas.com memberikan penyelesaian dengan membawa kasus ini ke pengadilan, sementara Jerat Papua memberikan penyelesaian dengan melakukan musyawarah dan membawa ke pengadilan. Dalam hal ini Jerat Papua lebih menonjolkan nilai berita proximity, karena media ini berada di Papua, dan konflik ini terjadi di Papua, maka media ini memiliki kedekatan secara daerah, dan lebih mudah untuk menjangkau kawasan konflik, dibandingkan dengan Kompas.com. Sehingga media Jerat Papua jauh lebih sering memberikan penawaran masalah yang diberikan oleh jurnalis. Nilai berita yang ada dalam sebuah berita tentunya dapat berbeda, karena hal ini dipengaruhi dengan dimana jurnalis itu bekerja, jika jurnalis bekerja di media lokal maka akan lebih fokus pada berita yang relevan dan berdampak pada masyarakat setempat. Nilai berita juga berkaitan dengan budaya dan tradisi dimana tempat jurnalis bekerja, Jerat Papua merupakan media yang khusus untuk membahas kaum marginal, karena itu Jerat Papua yang jauh lebih banyak memberikan treatment recommendation daripada Kompas.com, hal ini karena Jerat Papua merupakan media yang dekat

dengan lokasi kejadian, maka nilai berita dalam Jerat Papua mengandung nilai berita proximity. Serta masyarakat Papua memiliki kedekatan tersendiri dengan masyarakatnya, hal ini terjadi karena mereka masih dipimpin oleh ketua suku, dan mereka sangat menghormati ketua suku mereka, serta masyarakat Papua juga masih menyelesaikan masalah melalui permusyawaratan, hal ini dilihat melalui berita ke 11 dalam Jerat Papua.

4.4. Diskusi

Teoritis Permasalahan konflik tanah adat yang berlarut-larut memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar yang harus disuarakan oleh media, serta pentingnya peran media mengawal kasus lingkungan hingga penyelesaian, agar tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar, Media masa memiliki peran sebagai pengawas dalam mengawal isu lingkungan, untuk memulai perubahan dengan memberitakan isu lingkungan secara profesional dan berkesinambungan (Ansori, 2020). Melalui analisis framing Entman ditemukan kesamaan pada pemberitaan Kompas.com dan Jerat Papua tentang konflik tanah adat di Papua menunjukkan pola yang serupa, aspek Define problem, dimana kedua media sama-sama membingkai permasalahan ini sebagai pelanggaran HAM agraria. Perbedaan pola pemberitaan didapat pada aspek Diagnose causes, Moral judgement, dan Treatment recommendation. Pada aspek Diagnose causes, Kompas.com memperkirakan masalah karena pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sementara Jerat Papua memperkirakan masalah karena pemerintah daerah dan perusahaan mengabaikan hak masyarakat. Pada aspek Moral judgement Kompas.com menekankan pentingnya perlindungan hutan adat yang menjadi identitas masyarakat Auyu, dan Jerat Papua membingkai sebagai pentingnya transparansi hukum. Pada Treatment recommendation. Kompas.com menyarankan agar kasus dibawa ke ranah hukum, hal ini karena Kompas.com merupakan media yang berada jauh dari Papua, dan tidak bisa melihat secara langsung kondisi disana. Sementara Jerat Papua 62 menyarankan Suku Auyu pada awalnya mengupayakan musyawarah, namun kemudian memilih langkah hukum setelah upaya musyawarah tidak berhasil. Jerat Papua meliput kasus ini secara konsisten sejak awal, sedangkan Kompas.com baru meliputnya secara

intensif setelah kasus ini mendapat sorotan di media sosial. Meskipun berbeda, kedua media menunjukkan komitmen untuk mendukung keadilan lingkungan dan kelestarian alam. Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Komunikasi Konflik Masyarakat Adat (Studi Kasus Konflik Perebutan Tanah Ulayat Masyarakat Desa Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat)” terdapat kesamaan dalam pemicu konflik. Dimana terdapat perbedaan pemaknaan tanah adat antara masyarakat adat sebagai pemilik tanah, dengan perusahaan sebagai pendatang (Pratita, 2018). Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria Di Desa Wadas, Purworejo (Studi pada Media Online Vice ID dan Detik.com)” terdapat kesamaan sikap antara media nasional dan media lokal terkait dengan konflik agrarian di wilayah Wadas yang diliput oleh media dengan orientasi profit. Dimana ditemukan salah satu media justru berpihak pada pemerintah yang bersikap tidak adil pada masyarakat setempat (Rakha, 2022). Bila ditinjau dari prinsip dalam peliputan konflik lingkungan hidup, apa yang dilakukan oleh Kompas.com dan Jerat Papua, sudah sesuai dengan sikap jurnalis dalam meliput lingkungan hidup, dimana jurnalis bersifat objektivitas, jurnalis harus berusaha untuk objektif dalam melaporkan fakta mengenai isu lingkungan, yang tidak boleh memihak pada satu pihak tertentu. Serta jurnalis harus adil dalam mempertimbangkan semua sudut pandang dalam pemberitaan, termasuk pandangan dari masyarakat adat, komunitas lokal, ilmuwan dan pemerintah. Mereka harus memberikan suara pada semua pihak yang terkena dampak dari isu lingkungan. Jurnalis harus menyajikan semua informasi yang relevan tentang isu lingkungan hidup, baik yang positif maupun negatif. Mereka harus menghindari sensasionalisme dan tidak boleh melebih-lebihkan atau meminimalkan suatu isu. Jurnalis harus memastikan bahwa informasi yang mereka laporkan akurat dan terpercaya. Mereka harus menggunakan sumber yang kredibel dan memverifikasi informasi sebelum mempublikasikannya. Jurnalis harus sensitif terhadap dampak lingkungan hidup dari isu yang mereka laporkan. Mereka harus menggunakan bahasa yang

jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas (Sudibyo, 2014). Jurnalis harus berani untuk melaporkan isu-isu lingkungan hidup yang sulit dan kontroversial. Mereka harus tidak takut untuk menantang status quo dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup. Dari unsur diatas jurnalis dari Kompas.com dan Jerat Papua sudah memenuhi sikap jurnalis dalam meliput lingkungan hidup. 63 64 BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Kesimpulan diambil dari perumusan masalah dan tujuan studi ini, yang berpusat pada penerapan kerangka framing Robert Entman untuk membingkai kasus penyitaan tanah adat Awyu dalam media Kompas dan Jerat Papua, serta dari analisis data penelitian. Ada pemahaman saling antara Kompas dan masyarakat Papua, khususnya dalam area Pendefinisian masalah. Kompas.com melihat konflik antara tanah dan Adat sebagai masalah yang terkait dengan pelanggaran HAM terhadap pekerja pertanian. Jerat Papua juga memiliki pandangan yang serupa, namun k media ini memiliki fokus yang berbeda. Kompas.com lebih menekankan pada perjuangan masyarakat Awyu dalam mengamankan hak mereka. Sedangkan Jerat Papua lebih fokus pada bagaimana komunitas Awyu saat ini sedang mengejar reformasi hukum, sebagaimana yang dinyatakan melalui judul artikel di semua media. Aspek-aspek, mendiagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan semuanya berbeda. Dalam komponen "mendiagnosis penyebab", Kompas.com percaya bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan masalah pertanian di wilayah Papua merupakan akar masalah. Suku Awyu dalam hal ini menjadi korban karena potensi kerusakan lingkungan dari serangan korporasi. Mengingat banyaknya tanah yang disita, Kompas.com memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan meminta dukungan dari Komnas HAM, sebuah organisasi independen dengan kedudukan yang sama dengan lembaga negara. untuk menjadi pihak ketiga dalam hal ini . Sementara Jerat Papua cenderung melihat masalah karena pemerintah daerah dan perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat Awyu. Suku Awyu menjadi korban karena kepentingan perusahaan dan ketidaktegasan pemerintah. Narasi dalam berita

menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan perusahaan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan AMDAL dan memberikan pembagian hasil yang sangat merugikan. Pada Diagnose Causes melihat fenomena penyerobotan hutan Adat suku Awyu Papua sebagai akibat dari pelanggaran HAM agraria yang ada di Papua. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aktivitas perusahaan di Papua dan konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan. Jerat Papua, sebaliknya, menganggap penyebab masalah sebagai pemerintah daerah dan perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat. Contohnya, masyarakat Adat Awyu Papua tidak dilibatkan dalam proses Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Kedua media melihat konflik tanah adat ini sebagai permasalahan ketidakadilan dan masalah hukum. yang penting untuk menemukan dampak negatif dan positif suatu proyek terhadap lingkungan. Pada elemen Moral judgement Kompas.com menekankan isu ini terkait dengan pentingnya melindungi hutan adat yang menjadi identitas masyarakat Awyu. Sedangkan Jerat Papua menekankan pentingnya memberikan transparansi perizinan kepada masyarakat adat Awyu. Perbedaan pola didapat pada aspek Treatment Recommendation Kompas.com menyarankan agar kasus ini dibawa ke ranah hukum, sedangkan Jerat Papua memberikan penyelesaian dimana Suku Awyu awalnya mencoba menyelesaikannya melalui musyawarah. Namun, setelah musyawarah gagal, Suku Awyu akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Berita Jerat Papua banyak membahas kebaruan tuntutan dan sidang yang sedang dijalankan oleh suku Awyu Papua. 65 Dalam berita ini, Kompas.com menonjolkan nilai berita significance, karena berita ini memiliki akibat bagi kehidupan orang banyak. 96 107 Significance dalam berita suku Awyu berarti bahwa kejadian tersebut mempengaruhi kehidupan orang banyak atau memiliki akibat terhadap kehidupan pembaca. Nilai berita Conflict yang mengandung keterlibatan antara masyarakat sipil yang berperan untuk menolak perusahaan sawit dan mempertahankan hutan adat mereka.. Berita ini juga mengandung nilai berita Impact karena konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan perusahaan sawit yang mengincar hutan adat menunjukkan perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Serta

berita ini juga mengandung nilai proximity yang dimiliki Jerat Papua, karena Jerat Papua merupakan media yang berada di Papua, sehingga mereka mudah menjangkau kawasan konflik tersebut, terlebih Jerat Papua merupakan media yang khusus dibuat untuk membahas mengenai kasus-kasus masyarakat marginal di Papua. Dalam melakukan publikasi berita konflik tanah adat jurnalis melakukan upaya yang melibatkan berbagai langkah, dimulai dengan mengumpulkan riset dan investigasi mendalam, karena jurnalis perlu melakukan riset mendalam untuk memahami kompleksitas isu-isu lingkungan hidup, dari berbagai sumber seperti masyarakat lokal, laporan pemerintah, dan organisasi nirlaba. Jurnalis perlu memilih angle dan narasi yang tepat dalam peliputan isu-isu lingkungan hidup, hal ini karena narasi yang tepat mampu menarik publik, dan membantu publik memahami berita dengan mudah. Serta jurnalis harus menjaga objektivitas dan keseimbangan. Kedua media melakukan upaya-upaya jurnalistik tersebut. Namun terdapat perbedaan lingkup pemberitaan media ditunjukkan dengan konsistensi Jerat Papua dalam meliput kasus sejak awal, sementara Kompas semakin intens ketika persoalan disuarakan di media sosial. Jurnalis kedua media pun mencoba menerapkan nilai pro-keadilan lingkungan dan pro-keberlanjutan dalam memberitakan peristiwa.

5.2. Saran Temuan dalam penelitian ini telah menunjukkan jika tidak adanya perbedaan pembedaan mengenai isu fenomena Konflik tanah Adat Suku Awyu Papua antara media Kompas.com dan Jerat Papua, mulai dari pemilihan isu dan seleksi pengemasan isu dalam pemberitaan periode yang sama melibatkan definisi masalah hingga rekomendasi penyelesaian masalah. Namun, keterbatasan penelitian ini memungkinkan adanya penelitian lanjutan di masa mendatang. Beberapa hal yang dapat diteliti dalam penelitian lanjutan adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saran Akademis 1. Penelitian dapat ditindak lanjuti dengan penelitian berikutnya dengan mencoba membandingkan pembedaan kasus perebutan tanah adat pada media asing yang secara konsisten mengangkat isu kemanusiaan dan lingkungan di wilayah Papua.

66 2. Penelitian berikutnya juga dapat metode wacana kritis untuk melihat

REPORT #22161187

bagaimana media nasional dan media local mewacanakan sengketa tanah adat.

5.2.2 Saran Praktis 1. Hasil ini dapat mendorong keterlibatan peliputan oleh media lain dalam mengangkat permasalahan tanah adat Awyu hingga memperoleh penyelesaian 2. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran pada masyarakat luas mengenai pentingnya keberpihakan media pada konflik lingkungan hidup yang mengancam keberlangsungan lingkungan dan merugikan masyarakat setempat.



REPORT #22161187

Results

Sources that matched your submitted document.

● IDENTICAL ● CHANGED TEXT

INTERNET SOURCE		
1.	1.51% www.kompas.com	● ●
	https://www.kompas.com/properti/read/2023/05/10/110000821/tak-hanya-ke-p...	
INTERNET SOURCE		
2.	1.1% suarapapua.com	●
	https://suarapapua.com/2023/11/03/gugatan-masyarakat-adat-awyu-ditolak-pu..	
INTERNET SOURCE		
3.	0.9% www.greenpeace.org	● ●
	https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56433/pejuang-lingkungan-...	
INTERNET SOURCE		
4.	0.88% eprints.iain-surakarta.ac.id	●
	https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8591/1/Ali%20Arfan%20Adilan_UIN%20Rade...	
INTERNET SOURCE		
5.	0.84% repository.uinsaizu.ac.id	●
	https://repository.uinsaizu.ac.id/20211/1/Sintiya%20Rahmawati_Kekerasan%20..	
INTERNET SOURCE		
6.	0.84% www.repository.usni.ac.id	●
	https://www.repository.usni.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=1798&bid=1788	
INTERNET SOURCE		
7.	0.83% nasional.kompas.com	●
	https://nasional.kompas.com/read/2023/05/09/23181801/suku-awyu-papua-dat...	
INTERNET SOURCE		
8.	0.8% www.greenpeace.org	●
	https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57412/putusan-ptun-jayapu..	
INTERNET SOURCE		
9.	0.79% pusaka.or.id	●
	https://pusaka.or.id/tag/gugatanlingkunganhidup/	



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE		
10. 0.75%	etheses.iainponorogo.ac.id https://etheses.iainponorogo.ac.id/20932/1/Viky%20Ardinza%20-%20302180126..	●
INTERNET SOURCE		
11. 0.73%	repository.usahidsolo.ac.id http://repository.usahidsolo.ac.id/2342/5/Nabila%20Prajna%20Paramita_BAB%...	●
INTERNET SOURCE		
12. 0.73%	repository.uinjkt.ac.id https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73107/1/JAJILAH-FD..	●
INTERNET SOURCE		
13. 0.7%	eprints.upj.ac.id https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/7613/10/10.%20BAB%20III.pdf	●
INTERNET SOURCE		
14. 0.67%	www.greenpeace.org https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56698/satu-nibung-beragam..	●
INTERNET SOURCE		
15. 0.67%	jurnalrisetkomunikasi.org http://jurnalrisetkomunikasi.org/index.php/jrk/article/download/64/41	●
INTERNET SOURCE		
16. 0.67%	ibn.e-journal.id https://ibn.e-journal.id/index.php/daruna/article/download/666/480/	●
INTERNET SOURCE		
17. 0.63%	suarapapua.com https://suarapapua.com/2023/11/08/masyarakat-adat-awyu-sangat-kecewa-ter...	●
INTERNET SOURCE		
18. 0.63%	repository.umy.ac.id https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31336/BAB%20III.pdf..	●
INTERNET SOURCE		
19. 0.62%	pusaka.or.id https://pusaka.or.id/kami-akan-banding-karena-ini-menyangkut-hak-hak-masya..	●
INTERNET SOURCE		
20. 0.61%	www.ekuatorial.com https://www.ekuatorial.com/2023/10/hutan-masyarakat-adat-suku-awyu-papua..	●



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE		
21.	0.6% www.thepapujournal.com https://www.thepapujournal.com/regional/6988724309/tim-advokasi-selamatk..	●
INTERNET SOURCE		
22.	0.56% strategikomunikasi.blogspot.com https://strategikomunikasi.blogspot.com/2013/06/perangkat-dan-framing-entm...	●
INTERNET SOURCE		
23.	0.56% kc.umn.ac.id https://kc.umn.ac.id/id/eprint/214/4/BAB%20III.pdf	●
INTERNET SOURCE		
24.	0.54% repository.uin-suska.ac.id http://repository.uin-suska.ac.id/20664/7/9.%20BAB%20II.pdf	●
INTERNET SOURCE		
25.	0.54% repository.uin-suska.ac.id http://repository.uin-suska.ac.id/42749/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf	●
INTERNET SOURCE		
26.	0.53% id.wikipedia.org https://id.wikipedia.org/wiki/Robert_N._Entman	●
INTERNET SOURCE		
27.	0.51% www.greenpeace.org https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56193/pejuang-lingkungan-...	●
INTERNET SOURCE		
28.	0.5% journal.student.uny.ac.id https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ilkom/article/download/19180/1763..	●
INTERNET SOURCE		
29.	0.5% repository.uksw.edu https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10106/4/T1_362010009_BAB%20I.pdf	●
INTERNET SOURCE		
30.	0.48% repository.bsi.ac.id https://repository.bsi.ac.id/repo/files/394866/download/Jurnal-2(1)--Analisis-Fr...	●
INTERNET SOURCE		
31.	0.47% repository.uin-suska.ac.id http://repository.uin-suska.ac.id/15829/7/7.%20BAB%20II_2018224KOM.pdf	●



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE		
32. 0.47%	fokuspapua.com https://fokuspapua.com/masyarakat-adat-suku-awyu-ptun-kan-pemerintah-pro..	●
INTERNET SOURCE		
33. 0.47%	repository.uinjkt.ac.id https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62736/1/RAHMASAR..	●
INTERNET SOURCE		
34. 0.46%	eprints.uinsaizu.ac.id https://eprints.uinsaizu.ac.id/15292/1/SKRIPSI%20FULL%20FIX.pdf	●
INTERNET SOURCE		
35. 0.46%	elibrary.unikom.ac.id https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3054/8/UNIKOM_SAYYIDIL%20IHSAN_418..	●
INTERNET SOURCE		
36. 0.46%	repository.ptiq.ac.id https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1269/1/SKRIPSI%20Sayid%20holil%20-%2..	●
INTERNET SOURCE		
37. 0.45%	repository.iainbengkulu.ac.id http://repository.iainbengkulu.ac.id/5706/1/SKRIPSI%20LALAKK.pdf	●
INTERNET SOURCE		
38. 0.45%	digilib.unila.ac.id http://digilib.unila.ac.id/21368/15/BAB%20II.pdf	●
INTERNET SOURCE		
39. 0.44%	inside.kompas.com https://inside.kompas.com/about-us	●
INTERNET SOURCE		
40. 0.44%	jubi.id https://jubi.id/tanah-papua/2023/pejuang-lingkungan-suku-awyu-ajukan-interv...	●
INTERNET SOURCE		
41. 0.41%	ejournal.bsi.ac.id https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/10042/...	●
INTERNET SOURCE		
42. 0.4%	elibrary.unikom.ac.id https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/800/9/10.%20UNIKOM_RYAN%20CRISTI%..	●



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE		
43.	0.39% repository.ar-raniry.ac.id https://repository.ar-raniry.ac.id/21513/1/Qamaruzzaman%2C%2030183825%2C..	●
INTERNET SOURCE		
44.	0.39% journal.moestopo.ac.id https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/147/92	●
INTERNET SOURCE		
45.	0.39% ettheses.iainponorogo.ac.id https://ettheses.iainponorogo.ac.id/23563/1/Ethesis%20Tiya%20Andriyani.pdf	●
INTERNET SOURCE		
46.	0.37% repository.uinsaizu.ac.id https://repository.uinsaizu.ac.id/9457/2/TAHRIFUDIN_ANALISIS%20FRAMING%2...	●
INTERNET SOURCE		
47.	0.37% repositori.untidar.ac.id https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=36269&bid=11011	●
INTERNET SOURCE		
48.	0.35% detakusk.com https://detakusk.com/opini/suku-awyu-dengan-kehidupan-hutannya	●
INTERNET SOURCE		
49.	0.35% repository.radenfatah.ac.id https://repository.radenfatah.ac.id/16808/2/3.%20BAB%20II_DEA%20AL%20SYA..	●
INTERNET SOURCE		
50.	0.35% journal.uny.ac.id https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/downloadSuppFile/10565/...	●
INTERNET SOURCE		
51.	0.33% eprints.umm.ac.id http://eprints.umm.ac.id/3015/2/BAB%20II%20.pdf	●
INTERNET SOURCE		
52.	0.32% repository.uin-suska.ac.id https://repository.uin-suska.ac.id/20662/7/9.%20BAB%20II.pdf	●
INTERNET SOURCE		
53.	0.32% perpustakaan.univpancasila.ac.id https://perpustakaan.univpancasila.ac.id/repository/EJNUPT180209-INFORMASI_V46N...	●



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE		
54. 0.3%	betahita.id https://betahita.id/news/detail/9200/ptun-jakarta-tolak-gugatan-dua-perusaha...	●
INTERNET SOURCE		
55. 0.3%	jurnal.univrab.ac.id https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/download/4392/1784/	●
INTERNET SOURCE		
56. 0.3%	repository.upi.edu http://repository.upi.edu/29773/6/S_PKN_1304089_Chapter%203.pdf	●
INTERNET SOURCE		
57. 0.3%	digilib.uin-suka.ac.id https://digilib.uin-suka.ac.id/41758/1/BAB%20I%20dan%20V%20DAFTAR%20PU...	●
INTERNET SOURCE		
58. 0.29%	blog.tempoinstitute.com https://blog.tempoinstitute.com/berita/nilai-nilai-berita-yang-wajib-diketahui-w..	●
INTERNET SOURCE		
59. 0.29%	repository.uinjkt.ac.id https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41407/1/DEVI%20P...	●
INTERNET SOURCE		
60. 0.29%	law.ugm.ac.id https://law.ugm.ac.id/diskusi-puskaha-djojodigoeno-gugatan-lingkungan-dan-p...	●
INTERNET SOURCE		
61. 0.28%	journal.rc-communication.com https://journal.rc-communication.com/index.php/JPCM/article/download/20/23..	●
INTERNET SOURCE		
62. 0.28%	repository.uinsu.ac.id http://repository.uinsu.ac.id/10650/1/SKRIPSI.Dede.pdf.pdf	●
INTERNET SOURCE		
63. 0.28%	repository.uniga.ac.id https://repository.uniga.ac.id/file/mahasiswa/48808169.pdf	●
INTERNET SOURCE		
64. 0.27%	www.kompas.com https://www.kompas.com/skola/read/2022/02/14/184417169/model-analisis-fra...	●



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE		
65.	0.27% elibrary.unikom.ac.id https://elibrary.unikom.ac.id/405/9/UNIKOM_ARYA%20REKSA%20BASKARA_418...	●
INTERNET SOURCE		
66.	0.27% syekhnurjati.ac.id https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/article/download/8111/3827	●
INTERNET SOURCE		
67.	0.26% media.neliti.com https://media.neliti.com/media/publications/232179-anomali-dan-teori-hirarki-...	●
INTERNET SOURCE		
68.	0.26% digilib.uinsa.ac.id http://digilib.uinsa.ac.id/59551/3/Mirza%20Ghulam%20Ahmad_E94219024%20o..	●
INTERNET SOURCE		
69.	0.25% www.gramedia.com https://www.gramedia.com/literasi/fungsi-fakta-dalam-berita/	●
INTERNET SOURCE		
70.	0.24% ejournal3.undip.ac.id https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/download/2939...	●
INTERNET SOURCE		
71.	0.24% journal.uinjkt.ac.id https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jsj/article/download/22984/9372	●
INTERNET SOURCE		
72.	0.23% eprints.iain-surakarta.ac.id https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8594/1/FULLTEXT%20SKRIPSI_TAUFIK%20K...	●
INTERNET SOURCE		
73.	0.23% repository.uinjkt.ac.id https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72501/1/DIAN%20C...	●
INTERNET SOURCE		
74.	0.22% repositori.unsil.ac.id http://repositori.unsil.ac.id/3829/7/7.%20BAB%20III%20Metodologi%20Peneliti...	●
INTERNET SOURCE		
75.	0.22% ejournal.undip.ac.id https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/download/50088/23218	●



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE		
76.	0.22% repository.uksw.edu https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11730/2/T1_362012078_BAB%20II.pdf	●
INTERNET SOURCE		
77.	0.21% ejournal.unsrat.ac.id https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/123456789/11730/2/T1_362012078_BAB%20II.pdf	●
INTERNET SOURCE		
78.	0.19% repository.umy.ac.id https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31336/BAB%20II.pdf?sequence=1	●
INTERNET SOURCE		
79.	0.18% www.slideshare.net https://www.slideshare.net/slideshow/memahami-berita-dan-teknik-menulis-buku-dari-sudut-penelitian-pustaka-123456789	●
INTERNET SOURCE		
80.	0.18% jurnal.upnyk.ac.id http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/download/7455/pdf	●
INTERNET SOURCE		
81.	0.17% repository.uniga.ac.id https://repository.uniga.ac.id/file/mahasiswa/1428382368.pdf	●
INTERNET SOURCE		
82.	0.17% repository.uin-suska.ac.id http://repository.uin-suska.ac.id/16124/9/9.%20BAB%20IV_2018311KOM.pdf	●
INTERNET SOURCE		
83.	0.16% pusaka.or.id https://pusaka.or.id/wp-content/uploads/2023/11/Siaran-Pers-Pejuang-Lingku...	●
INTERNET SOURCE		
84.	0.16% eskripsi.usm.ac.id https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2014/G.311.14.0010/G.311.14.0010-...	●
INTERNET SOURCE		
85.	0.16% kc.umn.ac.id https://kc.umn.ac.id/16619/4/BAB_II.pdf	●
INTERNET SOURCE		
86.	0.16% etd.umy.ac.id https://etd.umy.ac.id/18006/2/Bab%20I.pdf	●



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE		
87. 0.15%	www.farmlandgrab.org https://www.farmlandgrab.org/post/31658-gugatan-izin-lingkungan-suku-awyu...	●
INTERNET SOURCE		
88. 0.15%	www.esaunggul.ac.id https://www.esaunggul.ac.id/framing-berita-gayus-tambunan-di-surat-kabar-m...	●
INTERNET SOURCE		
89. 0.15%	kc.umn.ac.id https://kc.umn.ac.id/16139/8/BAB_II.pdf	●
INTERNET SOURCE		
90. 0.15%	ejournal.upbatam.ac.id https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/72...	●
INTERNET SOURCE		
91. 0.15%	library.jakarta.bawaslu.go.id https://library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnaldanbuku/serial_evaluasi...	● ●
INTERNET SOURCE		
92. 0.14%	repository.iainkudus.ac.id http://repository.iainkudus.ac.id/4945/6/06%20BAB%20III.pdf	●
INTERNET SOURCE		
93. 0.14%	kc.umn.ac.id https://kc.umn.ac.id/297/4/BAB%20III.pdf	●
INTERNET SOURCE		
94. 0.14%	eprints.ubhara.ac.id http://eprints.ubhara.ac.id/2017/1/Revisi%20Umik-dikonversi%20%282%29.pdf	●
INTERNET SOURCE		
95. 0.13%	www.kompas.id https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/13/tak-diinformasikan-perihal...	●
INTERNET SOURCE		
96. 0.13%	repository.unas.ac.id http://repository.unas.ac.id/8953/3/BAB%20II.pdf	●
INTERNET SOURCE		
97. 0.12%	www.cnnindonesia.com https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230510125859-12-947708/nestapa-s...	●



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE

98. **0.12%** repository.uin-suska.ac.id

https://repository.uin-suska.ac.id/16124/6/6.%20BAB%20I_2018311KOM.pdf



INTERNET SOURCE

99. **0.12%** journal2.uad.ac.id

<https://journal2.uad.ac.id/index.php/commicast/article/download/3150/pdf/106..>



100.

INTERNET SOURCE

0.11% eprints.umpo.ac.id

<http://eprints.umpo.ac.id/5907/3/BAB%20II.pdf>



101.

INTERNET SOURCE

0.1% id.wikipedia.org

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_\(surat_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat_kabar))



102.

INTERNET SOURCE

0.1% magdalene.co

<https://magdalene.co/story/arti-tagar-all-eyes-on-papua/>



103.

INTERNET SOURCE

0.1% repository-penerbitlitnus.co.id

<https://repository-penerbitlitnus.co.id/80/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20P...>



104.

INTERNET SOURCE

0.1% eprints.ubhara.ac.id

<http://eprints.ubhara.ac.id/1040/1/CHARINA%20N.pdf>



105.

INTERNET SOURCE

0.09% repo.uinsatu.ac.id

<http://repo.uinsatu.ac.id/13070/6/BAB%20III.pdf>



106.

INTERNET SOURCE

0.09% repositori.umsida.ac.id

0.09% repositori.umsida.ac.id





107.

INTERNET SOURCE

0.08% e-journal.uajy.ac.id



<http://e-journal.uajy.ac.id/1916/2/1KOM02932.pdf>

109.

INTERNET SOURCE

0.08% repository.uin-suska.ac.id



0.08% repository.uin-suska.ac.id/15871/7/7.%20BAB%20II_2018242KOM.pdf



<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/download/8277/4182>

110.

INTERNET SOURCE

0.08% www.forestpeoples.org



<https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2013/08/cerduam...>

111.

INTERNET SOURCE

0.08% eprints.kwikkiangie.ac.id



<http://eprints.kwikkiangie.ac.id/4748/3/BAB%20II%20KAJIAN%20PUSTAKA.pdf>

112.

INTERNET SOURCE

0.07% proceeding.unesa.ac.id



<https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/895/375/3214>

113.

INTERNET SOURCE

0.07% repositori.unsil.ac.id



<http://repositori.unsil.ac.id/3280/4/BAB%20III.pdf>

114.

INTERNET SOURCE

0.07% repositori.untidar.ac.id



<https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=29573&bid=11926>

115.

INTERNET SOURCE

0.07% eprints.untirta.ac.id



<https://eprints.untirta.ac.id/807/1/REPRESENTASI%20KARAKTER%20KONTRIBU...>

116.

INTERNET SOURCE

0.07% journal.uin-alauddin.ac.id



<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/5997/516..>

117.

INTERNET SOURCE

0.07% repository.umsu.ac.id

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7356/SKRIPSI LENGK...>



PLAGIARISM
CHECK.ORG



REPORT #22161187

118.

INTERNET SOURCE

120.
0.08% www.academia.edu

https://www.academia.edu/48996336/Jurnalisme_warga_dan_media_sosial

0.06% journal.uinjkt.ac.id

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jsj/article/download/16322/8178>



119.

INTERNET SOURCE

121.
0.08% id.wikipedia.org

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas.com>

0.06% kc.umn.ac.id

https://kc.umn.ac.id/15472/4/BAB_II.pdf



122.

INTERNET SOURCE

0.06% eteses.uinsgd.ac.id

https://theses.uinsgd.ac.id/13420/4/4_bab1.pdf



123.

INTERNET SOURCE

0.06% www.bola.com

<https://www.bola.com/ragam/read/4991667/jenis-jenis-teks-berita-lengkap-bes...>



124.

INTERNET SOURCE

0.05% www.academia.edu

https://www.academia.edu/90440486/PKM_Peran_Mahasiswa_Kampus_Mengaji...



125.

INTERNET SOURCE

0.05% media.neliti.com

<https://media.neliti.com/media/publications/42435-ID-analisis-framing-robot-e...>



126.

INTERNET SOURCE

0.05% pdfs.semanticscholar.org

<https://pdfs.semanticscholar.org/9958/da439a1b1fb13d3a1ad058c2f0a5f984b93...>



127.

INTERNET SOURCE

0.05% www.publication.idsolutions.co.id

<https://www.publication.idsolutions.co.id/journals/index.php/askari/article/dow..>



128.

INTERNET SOURCE

0.04% repository.upi.edu

http://repository.upi.edu/53411/4/S_IND_1607845_Chapter3.pdf



PLAGIARISM
CHECK.ORG



REPORT #22161187

129.

INTERNET SOURCE

131.
0.04% repository.unika.ac.id

INTERNET SOURCE
<http://repository.unika.ac.id/30614/4/18.M1.0039-SANTIKA%20ANDRIANI%20BU...>

0.03% repository.uinjkt.ac.id

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/311/1/101702-ENI...>



130.

INTERNET SOURCE

132.
0.03% eprints.untirta.ac.id

INTERNET SOURCE
<https://eprints.untirta.ac.id/1328/1/RESTI%20FAUZIAH%20KURNIAWAN-%20full...>

0.01% www.cnnindonesia.com

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230510125859-12-947708/nestapa-s...>



133.

INTERNET SOURCE

0.01% repository.uinsaizu.ac.id

https://repository.uinsaizu.ac.id/9109/2/Achmad%20Husain_Analisis%20Wacan...



134.

INTERNET SOURCE

0.01% www.kompas.com

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/04/170000165/mengenal-suku-aw...>



135.

INTERNET SOURCE

0.01% repository.stpn.ac.id

<http://repository.stpn.ac.id/864/1/4%20Cover%20LAPORAN%20PENELITIAN%20..>



136.

INTERNET SOURCE

0.01% eprints.upj.ac.id

<https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/2198/9/09.%20BAB%20II.pdf>



● QUOTES

INTERNET SOURCE

1. 1.73% www.bbc.com

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo>

INTERNET SOURCE

2. 1.36% www.greenpeace.org

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56433/pejuang-lingkungan-...>

3.24% www.greenpeace.org

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56193/pejuang-lingkungan-...>



PLAGIARISM
CHECK.ORG

INTERNET SOURCE

4. 1% www.parapatv.id

REPORT #22161187

<https://www.parapatv.id/2023/03/perjuangan-masyarakat-adat-awyu-peringa...>

INTERNET SOURCE

5. 0.9% www.kompas.com

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/05/10/110000821/tak-hanya-ke-p...>

INTERNET SOURCE

6. 0.77% fokuspapua.com

<https://fokuspapua.com/masyarakat-adat-suku-awyu-ptun-kan-pemerintah-pro...>

INTERNET SOURCE

7. 0.74% suarapapua.com

<https://suarapapua.com/2023/05/09/berjuang-selamatkan-hutan-awyu-masyara..>

INTERNET SOURCE

8. 0.72% jubi.id

<https://jubi.id/tanah-papua/2023/pejuang-lingkungan-suku-awyu-ajukan-interv...>

INTERNET SOURCE

9. 0.66% www.pikiran-rakyat.com

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017620643/3-konflik-agraria-di-pa...>

INTERNET SOURCE

10. 0.63% www.greenpeace.org

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57412/putusan-ptun-jayapu..>

INTERNET SOURCE

11. 0.61% www.kompas.com

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/04/170000165/mengenal-suku-aw...>

INTERNET SOURCE

12. 0.59% www.thepapujournal.com

<https://www.thepapujournal.com/regional/6988724309/tim-advokasi-selamatk..>

INTERNET SOURCE

13. 0.39% suarapapua.com

<https://suarapapua.com/2023/11/03/gugatan-masyarakat-adat-awyu-ditolak-pu..>

INTERNET SOURCE

14. 0.37% www.cnnindonesia.com

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230510125859-12-947708/nestapa-s...>

INTERNET SOURCE

15. 0.37% act.seasia.greenpeace.org

<https://act.seasia.greenpeace.org/id/awyu-tribe>



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE

16. **0.35%** medium.com

<https://medium.com/@bemfa.fmipa/aksi-dua-suku-di-papua-depan-gedung-ma..>

INTERNET SOURCE

17. **0.35%** nasional.tempo.co

<https://nasional.tempo.co/read/1876962/kata-para-tokoh-soal-seruan-all-eyes-...>

INTERNET SOURCE

18. **0.33%** campaign.com

<https://campaign.com/updates/16422/hari-lingkungan-sedunia-belajar-dari-suk...>

INTERNET SOURCE

19. **0.31%** detakusk.com

<https://detakusk.com/opini/suku-awyu-dengan-kehidupan-hutannya>

INTERNET SOURCE

20. **0.3%** www.kompasiana.com

<https://www.kompasiana.com/bertyadirachya0745/665d4d8bed6415719312793...>

INTERNET SOURCE

21. **0.3%** tekno.tempo.co

<https://tekno.tempo.co/read/1845416/alasan-masyarakat-adat-suku-awyu-men...>

INTERNET SOURCE

22. **0.3%** www.whiteboardjournal.com

<https://www.whiteboardjournal.com/column/siasat-apa-yang-bisa-kita-lakukan...>

INTERNET SOURCE

23. **0.29%** voi.id

<https://voi.id/berita/387268/mengenal-suku-awyu-dan-moi-pelopor-all-eyes-on...>

INTERNET SOURCE

24. **0.28%** pusaka.or.id

<https://pusaka.or.id/tag/sukuawyu/>

INTERNET SOURCE

25. **0.28%** www.sambangdesa.com

<https://www.sambangdesa.com/2024/06/mengapa-suku-awyu-dan-suku-moi-b...>

INTERNET SOURCE

26. **0.27%** www.greenpeace.org

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56905/hutan-sumber-hidup...>



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE

27. **0.27%** travel.tempo.co

<https://travel.tempo.co/read/1876687/mengenal-suku-awyu-dan-moi-yang-diju...>

INTERNET SOURCE

28. **0.26%** suarapapua.com

<https://suarapapua.com/2023/10/26/gugatan-suku-awyu-di-ptun-jayapura-fase...>

INTERNET SOURCE

29. **0.25%** www.greenpeace.org

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57027/ptun-jakarta-tolak-gu..>

INTERNET SOURCE

30. **0.22%** www.greenpeace.org

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56698/satu-nibung-beragam..>

INTERNET SOURCE

31. **0.22%** www.kompas.id

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/27/suku-awyu-dan-moi-seruk..>

INTERNET SOURCE

32. **0.22%** context.id

<https://context.id/read/2090/all-eyes-on-papua%2C-perjuangan-suku-awyu-dan..>

INTERNET SOURCE

33. **0.22%** bakabar.com

<https://bakabar.com/post/miris-suku-awyu-dintimidasi-di-hutan-adatnya-sendi...>

INTERNET SOURCE

34. **0.21%** pusaka.or.id

https://pusaka.or.id/wp-content/uploads/2023/11/Salinan_putusan_6_G_LH_20..

INTERNET SOURCE

35. **0.21%** beritalingkungan.com

<https://beritalingkungan.com/2024/05/28/suku-awyu-dan-moi-gelar-aksi-damai...>

INTERNET SOURCE

36. **0.2%** www.mongabay.co.id

<https://www.mongabay.co.id/2024/06/04/suku-awyu-dan-moi-tolak-sawit-mint...>

INTERNET SOURCE

37. **0.2%** betahita.id

<https://betahita.id/news/detail/10281/lawan-sawit-suku-awyu-dan-moi-berhara...>



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE

38. **0.19%** www.jeratpapua.org

<https://www.jeratpapua.org/suku-awyu-kami-akan-mempertahankan-tanah-hu...>

INTERNET SOURCE

39. **0.18%** jdih.mahkamahagung.go.id

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/putusan-perkara-pida...>

INTERNET SOURCE

40. **0.16%** www.walhi.or.id

<https://www.walhi.or.id/walhi-papua-mengecam-tindakan-represif-polisi-terhad..>

INTERNET SOURCE

41. **0.16%** manunggal.undip.ac.id

<https://manunggal.undip.ac.id/konflik-masyarakat-adat-dan-pemerintah-alleye...>

INTERNET SOURCE

42. **0.15%** supernews.co.id

<https://supernews.co.id/berita/1855-masyarakat-suku-awyu-dan-moi-papua-tu...>

INTERNET SOURCE

43. **0.15%** www.kompas.id

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/04/mengapa-suku-awyu-dan...>

INTERNET SOURCE

44. **0.14%** www.voaindonesia.com

<https://www.voaindonesia.com/a/mungkinkah-gunakan-pendekatan-manusiaw..>

INTERNET SOURCE

45. **0.12%** suarapapua.com

<https://suarapapua.com/2023/11/08/masyarakat-adat-awyu-sangat-kecewa-ter...>

INTERNET SOURCE

46. **0.12%** nasional.tempo.co

<https://nasional.tempo.co/read/1875696/viral-alleyesonpapua-di-x-bentuk-solid..>

INTERNET SOURCE

47. **0.12%** www.aman.or.id

<https://www.aman.or.id/index.php/news/read/1574>

INTERNET SOURCE

48. **0.12%** tgcfahatan-orm.ipb.ac.id

<https://tgcfahatan-orm.ipb.ac.id/hari-lingkungan-hidup-sedunia/>



REPORT #22161187

INTERNET SOURCE

49. **0.11%** www.farmlandgrab.org

<https://www.farmlandgrab.org/post/31658-gugatan-izin-lingkungan-suku-awyu...>

INTERNET SOURCE

50. **0.09%** nasional.kompas.com

<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/09/23181801/suku-awyu-papua-dat...>

INTERNET SOURCE

51. **0.09%** tirto.id

<https://tirto.id/siapa-pemilik-pt-indo-asiana-lestari-kenapa-suku-awyu-demo-gZ..>

INTERNET SOURCE

52. **0.08%** pusaka.or.id

<https://pusaka.or.id/kami-akan-banding-karena-ini-menyangkut-hak-hak-masya..>

INTERNET SOURCE

53. **0.07%** metro.tempo.co

<https://metro.tempo.co/read/1875948/all-eyes-on-papua-walhi-konflik-suku-aw...>

INTERNET SOURCE

54. **0.07%** travel.detik.com

<https://travel.detik.com/travel-news/d-7375020/all-eyes-on-papua-bersama-suk..>

INTERNET SOURCE

55. **0%** betahita.id

<https://betahita.id/news/detail/9200/ptun-jakarta-tolak-gugatan-dua-perusaha...>